

**PENDALILAN USAHA HOTEL SYARIAH TANPA
SERTIFIKASI DI KOTA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh

SITI FATIMAH
NIM. 1302130020

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARI'AH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
TAHUN 2017 M / 1439 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **PENYELENGGARAAN USAHA HOTEL
SYARIAH TANPA SERTIFIKAT DI KOTA
PALANGKA RAYA**

NAMA : **SITI FATIMAH**

NIM : **130 213 0020**

FAKULTAS : **SYARIAH**

JURUSAN : **SYARIAH**

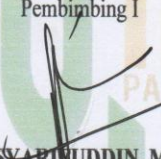
PROGRAM STUDI : **HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)**

JENJANG : **STRATA SATU (S1)**

Palangka Raya, 9 Oktober 2017

Menyetujui,

Pembimbing I

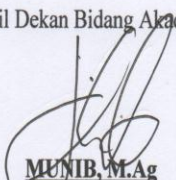

Dr. SYARIFUDDIN, M.Ag
NIP. 19700503 200112 1 002

Pembimbing II

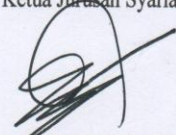

TRI HIDAYATI, MH
NIP. 19880081 420021 2 002

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik


MUNIB, M.Ag
NIP. 19600907 199003 1 002

Ketua Jurusan Syariah


Drs. SURYA SUKTI, MA
NIP. 19650516 199402 1 002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
saudari Siti Fatimah

Palangka Raya, 09 Oktober
2017

Kepada

Yth. **Ketua Panitia Ujian**
Skripsi IAIN Palangka Raya
di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari:

NAMA : Siti Fatimah

NIM : 130 213 0020

JUDUL : **PENYELENGGARAAN USAHA HOTEL SYARIAH**
TANPA SERTIFIKAT DI KOTA PALANGKA RAYA.

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

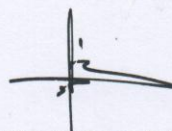
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Dr. SYARIFUDDIN, M.Ag
NIP. 19700503 200112 1 002

Pembimbing II,



TRI HIDAYATI, MH
NIP. 19880081 420021 2 002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "PENDALILAN USAHA HOTEL SYARIAH TANPA SERTIFIKASI DI KOTA PALANGKA RAYA", Oleh Siti Fatimah, Nim 1302130020 telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 25 Oktober 2017

Palangka Raya, 25 Oktober 2017

Tim Penguji:

1. NORWILI, M.H.I
Ketua Sidang/Penguji

2. Drs. SURYA SUKTI, M.A
Penguji I

3. Dr. SYARIFUDDIN, M.Ag
Penguji II

4. TRI HIDAYATI, S.HI. MH
Sekretaris Sidang/Penguji

Dekan Fakultas Syari'ah,

H. SYAIKHU, MHI
NIP. 19711107 1999031005

PENDALILAN USAHA HOTEL SYARIAH TANPA SERTIFIKASI DI KOTA PALANGKA RAYA

ABSTRAK

Tujuan utama penelitian ini adalah: (1) Penyebab usaha hotel syariah di Kota Palangka Raya tidak melakukan proses sertifikasi, (2) Akibat hukum usaha hotel syariah yang tidak bersertifikat, (3) Peran dinas kebudayaan dan pariwisata dan DSN-MUI dalam pembinaan dan pengawasan hotel terhadap penyelenggaraan usaha hotel syariah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus dan penyajian data menggunakan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian berjumlah beberapa orang yaitu pemilik Obelix hotel, Dinas kebudayaan dan pariwisata kota Palangka Raya, dan Ketua MUI Kota Palangka Raya. Objek penelitian ini adalah Pendalilan Usaha Hotel Syariah Tanpa Sertifikasi. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Pertama, belum dilakukannya sosialisasi Permen Parekraf No. 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah kepada masyarakat terutama terhadap pemilik hotel yang menerapkan sistim syariah. Kedua, pemilik hotel tidak mendaftarkan diri sebagai usaha pariwisata. Ketiga, pembinaan dan pengawasan hanya dilakukan terhadap usaha hotel syariah yang telah mendaftarkan diri. (2) Akibat hukum yang diterima oleh pemilik hotel. Pertama, tidak ada kepastian hukum. Kedua, pemilik hotel tidak boleh mendalilkan diri sebagai syariah jika belum mendaftarkan diri dan melakukan proses sertifikasi usaha hotel syariah. (3) Substansi Permen Parekraf No. 2 Tahun 2014 bersifat Fakultatif. (4) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata belum pernah melakukan koordinasi dengan MUI yang membahas pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah sekaligus mengenai sertifikasi usaha hotel syariah.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan agar : (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan sosialisasi mengenai Permen Parekraf No. 2 Tahun 2014 kepada masyarakat dan melakukan pendataan terhadap hotel-hotel yang telah berdiri namun belum mendaftarkan diri. (2) Pemilik Obelix Hotel Syariah agar mendaftarkan diri sebagai usaha pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan segera mendaftarkan proses sertifikasi usaha hotel syariah yang dikelola agar memiliki sertifikat halal. (3) Perlu dibuat perda yang mengatur khusus tentang penyelenggaraan usaha hotel syariah agar dapat mengatur lebih detail dan bersifat imperaktif bagi pemilik hotel, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan DSN-MUI. (4) Perlu dilakukannya koordinasi antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan MUI yang membahas tentang tugas dan tanggungjawab yang berkaitan dengan penyelenggaraan usaha hotel syariah di kota Palangka Raya.

Kata kunci: Pendalilan, Usaha Hotel Syariah, Sertifikat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya, MUI kota Palangka Raya.

THE POSTULATED OF THE SHARIA BUSINESS HOTEL WITHOUT SERTIFICATION IN THE CITY OF PALANGKA RAYA

ABSTRACT

The Focus of this research, that are : 1) The cause of sharia hotel business does not perform the certification process, 2) The law effect on non-certified sharia hotel business, 3) The role of Dinas Kebudayaan dan Pariwisata and DSN-MUI in the guidance and supervision of hotels on the sharia hotel business service.

The method used in this research is qualitative research method with case approach and data presentation using descriptive qualitative. The subjects of this research total some people by using which covers the owner of Obelix hotel, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata of Palangka Raya, and Chairman of MUI of Palangka Raya. The object of this research is the postulated of the sharia business hotel without sertification. The data collection techniques are using interviews, observation and documentation. Data validation is using triangulation technique.

The result of this research concludes that: (1) Firstly, the socialization related to Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 about the guideline of Sharia Business Service to the public, especially to hotel owners who implement sharia system has not been conducted. Secondly, the hotel owner does not register as a tourism business. Thirdly, the guidance and supervision is only applied to the sharia hotels that have registered. (2) As the result of law in owner of hotel is, Firstly, There is no legal certainty. Secondly, the owner should not postulate it self as sharia if it has not registered yet and process the certification of business sharia hotel. (3) The substance of permen parekraf No. 2 tahun 2014 is Facultative. (4) Dinas kebudayaan dan pariwisata and MUI have not done coordination related to the sharia hotel business service.

Related to the conclusions, it is recommended that (1) Socialization on Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 should be conducted. (2) The owner of the hotel should register their business as a tourism business on Dinas Kebudayaan dan Pariwisata and register his tourism business for the process of halal certification business to MUI. (3) Create regulation governing that particularly about sharia hotel business service so it can arrange more detail and can be imperative for hotel owners, Dinas Kebudayaan dan pariwisata dan DSN-MUI. (4) Both Dinas kebudayaan dan pariwisata and MUI should coordinate to discuss duties and responsibilities related to sharia hotel business service.

Key word: Postulate, Sharia Hotel Business, Certification, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Palangka Raya, MUI Palangka Raya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala rahmat dan puji kepada Allah SWT, Dzat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah menganugerahkan keberkahan berupa ilmu sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “PENDALILAN USAHA HOTEL SYARIAH TANPA SERTIFIKASI DI KOTA PALANGKA RAYA”. Serta tidak lupa shalawat dan salam semoga tercurahkan atas baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau.

Berakhirnya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan orang-orang yang benar-benar ahli dengan bidang penelitian sehingga sangat membantu penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Yang terhormat Bapak Dr. Ibnu Elmi A.S. Pelu, SH, MH selaku rektor dan pencentus IAIN Palangka Raya semoga Allah SWT membalas setiap tetes keringat dalam memajukan dan mengembangkan ilmu di kampus ini untuk menjadi UIN Palangka Raya.
2. Yang terhormat Bapak H. Syaikh, M.H.I. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, semoga Allah SWT memberikan kekuatan agar dapat terus memajukan dan mengembangkan Fakultas Syari'ah ke depannya agar menjadi lebih baik.

3. Yang terhormat Bapak Dr. Ibnu Elmi A.S. Pelu, SH, MH, selaku pembimbing Akademik yang telah memberikan pembelajaran yang berharga.
4. Yang terhormat Bapak Dr. Syarifuddin, M.Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Tri Hidayati, M.H selaku Pembimbing II, semoga Allah SWT membalas segala kemuliaan hati para beliau yang begitu sabar dalam membimbing penulis sehingga terselesainya skripsi ini.
5. Yang terhormat dosen-dosen IAIN Palangka Raya, khususnya dosen Fakultas Syari'ah yang telah banyak memberikan pengetahuan keilmuan yang sangat berguna bagi penulis, semoga Allah SWT menjadikannya ilmu yang bermanfaat.
6. Penghormatan dan penghargaan, kasih sayang penulis kepada kedua Orang tua saya Ibu Ana dan Bapak Hamdi yang telah memberikan doa dan semangat bagi penulis, semoga Allah SWT membalas semuanya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bertujuan untuk membangun dalam kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca terlebih khususnya bagi penulis. *Amin yarobbal 'alamin.*

Palangka Raya, Juni 2017

Penulis,

Siti Fatimah
1302130020

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul
“PENDALILAN USAHA HOTEL SYARIAH TANPA SERTIFIKASI DI
KOTA PALANGKA RAYA” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil
penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika
keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap
menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 09 Oktober 2017
Yang membuat pernyataan,



PERSEMBAHAN

Peneliti Persembahkan Skripsi Ini Untuk

Yang pertama dan selalu di utamakan Allah SWT yang selalu memberikan rasa tangguh untuk menghadapi segala yang menjadi kehendaknya. Tugas akhir ini merupakan kehendak nya yang sangat membuat saya selalu harus bersyukur dan bersabar atas segala bentuk sekapan ilmu.

Kedua Orang tua saya Bapak Hamdi Mama Ana lalu Ayah Kusnan Ibu Kamti kemudian Mas Muttik Mbak eli Mas udin yang selalu mendorong untuk terus pandai melompat seperti bayi tupai yang wajib mampu melompat untuk terus bisa melanjutkan hidup seperti tupai dewasa lainnya.

Untuk saudara-saudara dekat maupun yang jauh di sana yang meskipun tak tau persis mengenai tugas akhir ini tapi masih saja ikhlas mendoakan untuk selalu berhasil.

Untuk teman-teman seperjuangan “golden generation HES’13” dan AHS 2013 yang selalu berusaha menjatuhkan untuk membuat saya belajar bangkit dengan ayunan tangan kuat mereka.

Untuk teman-teman dalam suka dan duka, Amalia hikmah, Siti Ardiana, Khairunnisa dan Hendra Febriadi.

Untuk teman-teman Dewan Eksekutif Mahasiswa periode 2016/2017.

Dan Almamaterku IAIN Palangka Raya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS.....	ii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR BAGAN.....	xviii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penelitian	8
BAB II	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Konsep Penelitian.....	12
1. Pendalilan Usaha Hotel Syariah	12
2. Sertifikasi Usaha Hotel Syariah	17
C. Kerangka Teori.....	21
1. Teori Keberlakuan Hukum.....	21
2. Teori Efektivitas Hukum.....	23
3. Teori Kepastian Hukum	24
4. Teori Masalahah.....	26
D. Kerangka Berpikir	28
BAB III.....	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Waktu dan tempat penelitian.....	33
D. Subjek dan objek penelitian	33
E. Metode pengumpulan data	33
F. Penyajian data	37
G. Metode Pengabsahan Data	37
H. Metode Analisis data	38
BAB IV	40

A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
1.	Kota Palangka Raya	40
2.	Obelix Hotel Syariah.....	49
B.	Deskripsi Hasil Penelitian	56
1.	Penyebab Usaha Hotel Syariah di Kota Palangka Raya Tidak Melakukan Proses Sertifikasi.	56
2.	Akibat Hukum Usaha Hotel Syariah yang Tidak Melakukan Sertifikasi	59
3.	Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan DSN-MUI dalam Pembinaan dan Pengawasan Hotel Terhadap Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.....	61
C.	Analisis.....	65
1.	Analisis Penyebab Usaha Hotel Syariah di Kota Palangka Raya Tidak Melakukan Proses Sertifikasi.....	65
2.	Analisis Akibat Hukum Usaha Hotel Syariah yang Tidak Bersertifikat.....	74
3.	Analisis Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan DSN-MUI dalam Pembinaan dan Pengawasan Hotel Terhadap Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.....	80
BAB V	84
A.	Kesimpulan.....	84
B.	Saran.....	85
C.	Penutup.....	86
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR SINGKATAN

SWT = Subhanahu Wa ta'ala

Q.S = Quran Surah

MUI = Majelis Ulama Indonesia

DSN = Dewan Syariah Nasional

TDUP = Tanda Daftar Usaha Pariwisata

PAD = Pendapatan Asli Daerah

TPK = Tingkat Penghunian Kamar

NPWP = Nomor Pokok Wajib Pajak



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	L	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>Muta aqqidin</i>
عدة	Ditulis	Iddah

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	Jizyah

Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

الفطر زكاة	Ditulis	<i>zakātul fīṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah+alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah = ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعى	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>I</i>
كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ā</i>
فروض	Ditulis	<i>Furud</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah+ wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u iddat</i>
شكرتم لئن	Ditulis	<i>u iddat</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-quran</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "I" (el) nya

السماء	Ditulis	<i>As-sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

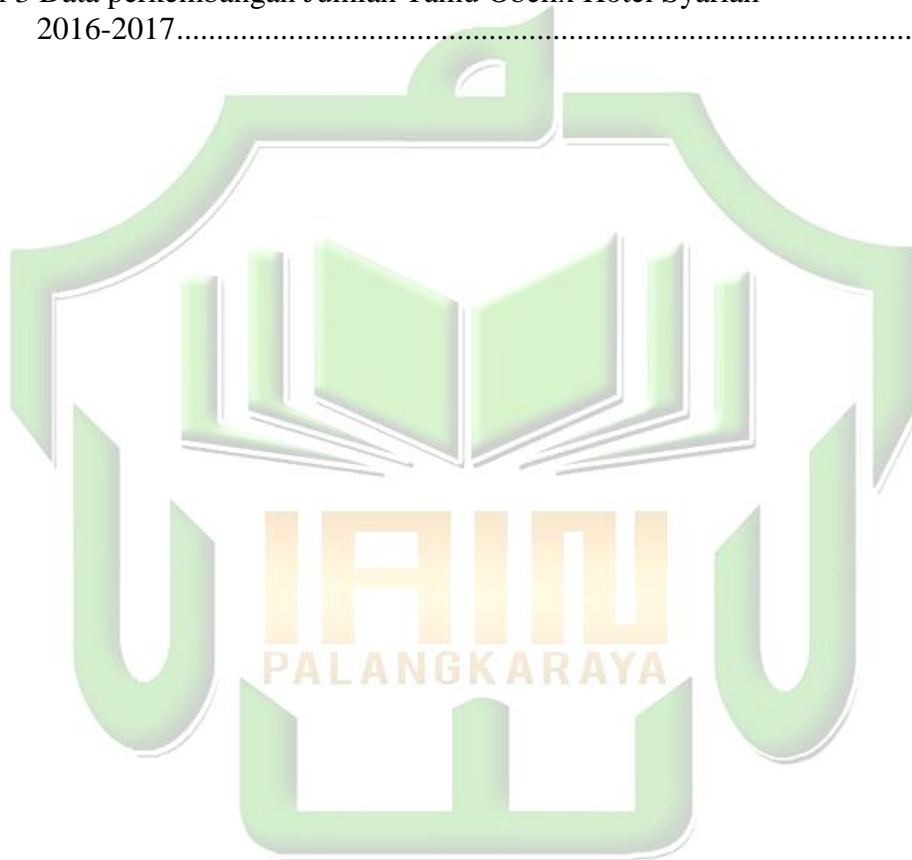
I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisnya

الفروض ذوي	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
السنة أهل	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Hotel di kota Palangka Raya	43
Tabel 2 Perkembangan tingkat penghunian kamar (TPK) di Hotel berbintang April 2016-April 2017	47
Tabel 3 Data perkembangan Jumlah Tamu Obelix Hotel Syariah 2016-2017.....	54



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Berpikir peneliti mengenai Pendalilan Usaha Hotel Syariah Tanpa Sertifikasi di kota Palangka Raya	31
Bagan 2 Susunan pengurus Obelix Hotel Syariah	51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini kehadiran sistem ekonomi syariah dinilai sangat responsif, selain sebagai alternatif di antara sistem kapitalisme dan sosialisme, juga mengusung misi ilahiyah yang sangat sesuai dengan nilai-nilai *humanistik* (khalifah), bukan itu saja tetapi juga nilai-nilai *tazkiyah* (kesucian) jauh dari hal-hal yang diharamkan, baik terhadap objek, proses maupun terhadap output-nya, semuanya harus bermuara dalam kerangka *limardhatillah*, Ridho Allah.

Dalam perspektif ekonomi Islam, ada tuntunan sekaligus tuntutan agar aktifitas bisnis dilakukan sesuai hukum Allah dengan memperhatikan aspek-aspek keridhaan dan kehalalannya. Penekanan kepada yang halal menjadi demikian penting, karena orang-orang yang memperoleh rezeki dari sumber-sumber yang haram dan dengan cara yang haram akan menimbulkan kerugian bagi kehidupannya di dunia ini bahkan mendapat azab di akhirat kelak.¹ Mengenai hal itu, Allah SWT memerintahkan kepada para hamba-Nya untuk melakukan kegiatan bisnis yang berorientasi pada hal-hal yang baik untuk mencapai ridha Allah SWT, seperti halnya dalam Q.S Al-Baqarah ayat 26;

¹Muhammad dan Rahmad Kurniawan, *Visi Dan Aksi Ekonomi Islam*, Malang: Intermedia, 2014, H, IX.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

261. perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.

Dan Q.S Al-Baqarah ayat 265;

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ
كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَفَاتَتْ أُكُلَهَا ضَعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا
وَابِلٌ فَطُلٌّ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾

265. dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat.²

Dalam surah Al-Baqarah ayat 261 dan 265 di atas dapat dimaknai bahwa Allah membuat perumpamaan terhadap manusia yang mencari nafkah halal dan berorientasi untuk mencari ridha Allah maka akan dijanjikan menjadi berlipat-lipat ganda karenanya, sungguh tidak ada yang buruk ketika kita melakukan segala aktivitas dengan melibatkan Allah.

Al-Quran penuh, sering dan berkali-kali mendesak manusia untuk selalu mendapatkan sesuatu dengan cara yang halal. Al-Quran memerintahkan kepada

²Al-Quran Terjemahan, Surah Al-Baqarah, Bandung : PT. Madina Raihan makmur, 2009 ayat 261 dan 265, h, 33-34.

para hamba-hamba-Nya untuk melakukan bisnis dengan menjauhi sesuatu yang mengarah kepada keburukan dalam mendapatkan keuntungan pun menjadi sebuah fakta yang tak terbantahkan.

Seluruh aktivitas hidup manusia, perlu dikaitkan dengan kesadaran adanya akhirat dimana setiap kita akan diminta pertanggungjawaban dalam kehidupan yang telah dijalannya di dunia, selain berorientasi pada nilai material namun juga memikirkan nilai lain yang justru lebih luhur, yakni nilai spiritual berupa “berkah” yang sangat penting untuk kehidupan.³ Inilah prinsip dan konsep yang diusung dalam menggalakkan sistem ekonomi syariah yang tengah marak saat ini di Indonesia khususnya.

Dalam perkembangan ekonomi syariah sebenarnya ada banyak hal, tidak hanya asuransi syariah, perbankan syariah, leasing syariah maupun pasar modal syariah. Ekonomi Syariah tidak hanya berkonotasi bank tanpa bunga, akan tetapi meliputi seluruh aspek kegiatan ekonomi, hingga hotel yang berbasis syariah.⁴

Pembangunan sektor sarana pariwisata dalam bidang perhotelan cukup pesat perkembangannya, karena hotel syariah merupakan usaha yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan tempat menginap/beristirahat, jasa ini sangat banyak diminati karena mobilitas kebutuhan masyarakat yang tinggi, yang salah satunya sedang berkembang di kota Palangka Raya.

³Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara____h, 75.

⁴Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia (Perspektif Sosio Yuridis)*, Jakarta : Paramuda Bookstore, 2008. h, 314-316.

Pertumbuhan ekonomi di kota Palangka Raya sangat erat hubungannya dengan pertumbuhan masing-masing sektor yang ada. Pertumbuhan sektor yang tumbuh dengan kecepatan sangat tinggi adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor Perdagangan hotel dan restoran. Sebagai kota yang berada di jalur lintasan kota-kota lain di Kalimantan Tengah,⁵ kota Palangka Raya memiliki potensi yang sangat besar di sektor tersier.⁶

Pada usaha hotel syariah terdiri atas produk, pelayanan dan pengelolaan yang mempunyai pengaruh besar untuk menarik minat para konsumennya. Produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel syariah yang baik adalah usaha hotel sesuai dan memenuhi kriteria yang ada pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah yang selanjutnya disebut Permenparekraf No. 2 Tahun 2014. Permenparekraf No. 2 Tahun 2014 ini mengatur tentang prosedur penilaian usaha hotel syariah yang melibatkan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam pasal 1 ayat (9) menyatakan bahwa pemberian sertifikat pada usaha hotel melalui audit untuk menilai kesesuaian produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel dengan kriteria usaha hotel syariah. Usaha hotel syariah yang dinyatakan lulus dalam proses sertifikasi dan beroperasi dengan bukti sertifikat yang dikeluarkan oleh DSN-MUI memiliki produk, pelayanan dan pengelolaan yang sesuai. Hal inilah yang akan membuat para tamu memberikan kepercayaan terhadap hotel dan akan kembali lagi untuk menginap.

⁵Badan Pusat Statistik kota Palangka Raya, <http://kalteng.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/90> Diakses 13-03-2017 pukul 09.22.

⁶Sektor tersier dalam pertumbuhan ekonomi kota Palangka Raya mencakup keuangan, persewaan, jasa perusahaan, Perdagangan, hotel dan restoran.

Sertifikat merupakan hal penting dalam keberadaan usaha hotel syariah, selain sebagai bukti nyata kehalalan namun juga bernilai lebih pada minat calon tamu yang hendak menggunakan jasa pelayanan berprinsip syariah. Para calon tamu akan mendapatkan kepastian dalam memilih tempat yang dirasa akan memberikan rasa aman dan tenteram atas segala hal yang berkaitan dengan kehalalan. Selain sebagai kepastian hukum bagi para tamu, juga bernilai sebagai sebuah ketaatan para pengusaha pada usaha jasa pelayanan berbasis syariah yang telah memiliki izin usaha pariwisata ini terhadap Permen Parekraf No. 2 Tahun 2014.

Berbicara mengenai izin, adanya legalitas izin usaha pariwisata maka berdampak positif pula terutama pada perolehan pendapatan dan pajak daerah sebagaimana diatur Peraturan daerah kota Palangka Raya Nomor 21 tahun 2014 perubahan kedua atas peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel dalam pasal 2 ayat (1 dan 2). Disamping itu ada pula dalam sebuah Peraturan Daerah kota Palangka Raya tentang pendaftaran usaha bidang pariwisata, dalam Peraturan Daerah tersebut memiliki beberapa tujuan yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengentaskan kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya dan memajukan kebudayaan.⁷ Dengan diaturnya segala hal yang berkaitan pendaftaran dan pajak hotel pada Peraturan Daerah, maka usaha jasa pelayanan yang telah dilaksanakan dengan kepatuhan akan memajukan daerah khususnya dibidang ekonomi.

⁷Peraturan Daerah Kota Palangka Raya, Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Pendaftaran Usaha Bidang Pariwisata pasal 3

Terkait produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel syariah ini, kota Palangka Raya sebagai salah satu daerah berkembang di Indonesia nampaknya terdapat usaha hotel syariah, hal ini menunjukkan ketertarikan/ketanggapan pengusaha di kota Palangka Raya dalam menangkap dan menyikapi Permen Parekraf No. 2 Tahun 2014.

Pada awal mula pembangunan Obelix Hotel Syariah ini merupakan hotel yang dibangun atas keinginan pemilik hotel untuk memiliki hotel yang tenteram dan stigma baik dalam pandangan masyarakat. Hotel yang dibangun sejak tahun 2011 lalu dan beroperasi hingga kini ini merupakan hotel berbasis syariah. Indikasi untuk disebut sebagai hotel syariah antara lain pegawai yang terlihat mengenakan jilbab, aturan larangan berduaan dalam satu kamar yang bukan mahram, larangan menerima tamu yang bukan mahram, larangan membawa minuman keras dan beralkohol, larangan berjudi dan penyediaan peralatan sholat dan alat ibadah lainnya mengindikasikan perkembangan hotel yang mulai merintis bisnisnya dan terus berkembang dengan basis syariah.⁸ Jika dilihat dari *feedback* konsumen yang pernah menginap di hotel tersebut, 9 dari 10 menyatakan senang dengan aturan yang diterapkan di lingkungan usaha hotel syariah ini.⁹

Namun di sisi lain, meskipun hotel telah menerapkan sistim syariah sejak tahun 2011, Obelix Hotel Syariah ini belum tercatat sebagai hotel syariah karena belum memiliki sertifikat dan mendapat sertifikasi dari kementerian dan DSN-MUI. Berdasarkan Permen Parekraf No. 2 Tahun 2014 pasal 11 dijelaskan bahwa

⁸Tata tertib Obelix Hotel Syariah.

⁹Review Tamu, <https://m.traveloka.com/hotel/indonesia/obelix-hotel-syariah-3000010003753> Diakses 3 november 2016 pukul 22:34.

pengusaha hotel yang telah memperoleh sertifikat hotel syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI saja yang dapat mendalilkan diri sebagai hotel syariah. Kemudian dalam pasal 5 dijelaskan bahwa bagi pengusaha hotel yang belum memperoleh sertifikat usaha hotel syariah saat berlakunya peraturan menteri di atas wajib menyesuaikan diri dalam jangka waktu satu tahun terhitung berlakunya peraturan menteri tersebut.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti memfokuskan kajian ini dengan sebuah judul : **Pendalilan Usaha Hotel Syariah Tanpa Sertifikasi di Kota Palangka Raya.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti :

1. Mengapa usaha hotel syariah di kota Palangka Raya tidak melakukan proses sertifikasi ?
2. Apa akibat hukum bagi hotel yang menyelenggarakan usaha hotel syariah tanpa memiliki sertifikat usaha syariah ?
3. Bagaimana peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Palangka Raya dan DSN-MUI kota Palangka Raya dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha hotel syariah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sebab usaha hotel syariah di Kota Palangka Raya tidak melakukan proses sertifikasi.

2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi hotel yang menyelenggarakan usaha hotel syariah tanpa memiliki sertifikat usaha syariah.
3. Untuk mengetahui peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Palangka Raya dan DSN-MUI kota Palangka Raya dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha hotel syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan agar bermanfaat secara teori maupun aplikasi bagi para pemilik usaha hotel syariah dan para calon pemilik hotel syariah.
2. Sebagai bahan masukan terhadap peran pembinaan dan pengawasan pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
3. Diharapkan agar bermanfaat secara teori maupun aplikasi terhadap pengembangan khazanah ilmu hukum ekonomi syariah.
4. Sebagai bahan informasi penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penelitian

Penulisan proposal penelitian ini tersusun atas sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan pustaka, pada bab ini membahas tentang konsep peneliti, kerangka teori, kerangka berpikir.

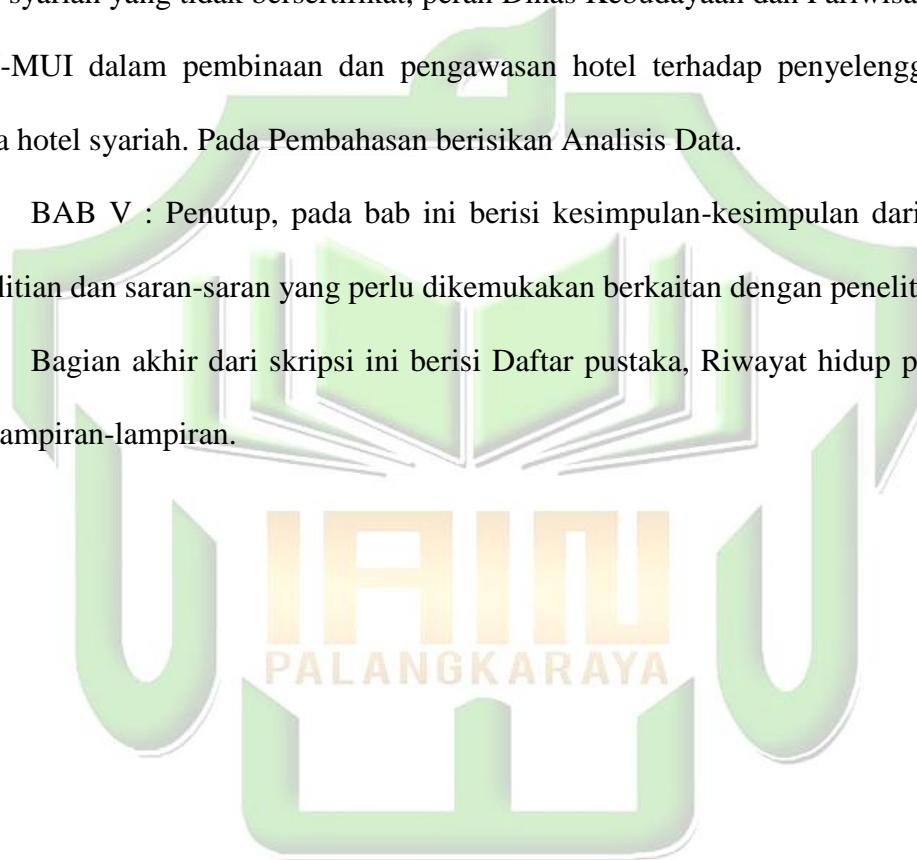
BAB III : Metode penelitian, pada bab ini memuat tentang penelitian terdahulu, jenis penelitian, pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian,

subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, penyajian data, metode pengabsahan data, metode analisis data, matrik kegiatan penelitian

BAB IV : Paparan Data dan Pembahasan. Pada paparan data ini menjelaskan: Gambaran Umum Lokasi Penelitian, penyebab usaha hotel syariah di Kota Palangka Raya tidak melakukan proses sertifikasi, akibat hukum usaha hotel syariah yang tidak bersertifikat, peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan DSN-MUI dalam pembinaan dan pengawasan hotel terhadap penyelenggaraan usaha hotel syariah. Pada Pembahasan berisikan Analisis Data.

BAB V : Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang perlu dikemukakan berkaitan dengan penelitian.

Bagian akhir dari skripsi ini berisi Daftar pustaka, Riwayat hidup penulis dan lampiran-lampiran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam setiap penelitian sudah barang tentu memerlukan acuan dan pengarah pikiran sebagai suatu bentuk permudahan dan kelancaran sebuah penelitian, maka dari itu penelitian terdahulu sangat berguna untuk menemukan persamaan dan perbandingan penelitian yang hendak dilakukan. Untuk memudahkan dalam membedakan penelitian penulis dengan para peneliti terdahulu dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

1. Skripsi oleh Abdul Warits, 2009, Program Studi Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, *Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Penerapan Prinsip-Prinsip Syari'ah Terhadap Minat Konsumen Hotel Syariah (Studi Kasus Pada Hotel Graha Agung Semarang)*. Disimpulkan bahwa kualitas pelayanan dan penerapan prinsip-prinsip syariah secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat konsumen hotel syariah. Persamaannya terletak pada subjek penelitian, yakni usaha hotel syariah. Perbedaannya pada fokus penelitian Abdul Warits adalah pengaruh kualitas pelayanan pada hotel syariah terhadap minat konsumen pada hotel Graha Agung Semarang. Adapun fokus penelitian penulis mengenai pendalilan usaha hotel syariah tanpa sertifikasi di kota Palangka Raya.
2. Skripsi Enny Rohmawati, 2016, Prodi Hukum Bisnis Syariah, UIN Malik Ibrahim Malang, *Penerapan peraturan menteri pariwisata dan ekonomi;*

kreatif No. 9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Pariwisata Pada Syariah Guest House Perspektif Masalahah. Disimpulkan bahwa ada dua temuan dalam penelitian ini, *Pertama*, berdasarkan Permen Parekraf No. 9 Tahun 2014 tentang standar usaha pondok pariwisata dalam penyelenggaraan di syariah guest house dinilai sudah cukup baik sesuai dengan ketentuan yang ada di dalamnya, hal ini dapat dilihat dari tiga aspek dasar yang dimiliki syariah guest house yang meliputi produk, pelayanan dan pengelolaan. *Kedua*, berdasarkan teori masalah syariah guest house dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan tolok ukur terhadap sistem bisnis yang baru ini yaitu bisnis usaha penginapan yang mempunyai kelas di bawah hotel syariah yang menanamkan kaidah Islam di dalamnya. Persamaanya pada kajian peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif, Perbedaanya Pada Fokus Penelitian Enny Rohmawati Adalah Penerapan Permen Parekraf No. 9 Tahun 2014 terhadap pondok pariwisata tentang standar usaha pondok pariwisata perspektif masalahah. adapun fokus penelitian penulis mengenai pendalilan usaha hotel syariah tanpa sertifikasi di kota Palangka Raya.

3. Skripsi oleh Syarifuddin, 2015, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, *Analisis produk, Pelayanan Dan Pengelolaan Bisnis Perhotelan Syariah Walisongo Surabaya.* Disimpulkan bahwa kurang terlaksananya dengan baik dalam pelaksanaan prinsip-prinsip syariah pada produk, pelayanan dan pengelolaan Hotel Syariah Walisongo Surabaya dan hotel

Walisongo termasuk pada penggolongan hotel golongan hilal-1 sesuai ketentuan mutlak hotel syariah yang diterapkan oleh Hotel Syariah Walisongo berdasarkan permen parekraf No. 2 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan hotel syariah. Persamaannya Penyelenggaraan Pada Hotel Syariah. Perbedaannya Pada Fokus Penelitian Syarifuddin adalah mengenai analisis produk, pelayanan dan pengelolaan bisnis perhotelan syariah pada hotel syariah. Adapun Fokus penelitian penulis mengenai pendalilan usaha hotel syariah tanpa sertifikasi di kota Palangka raya.

B. Konsep Penelitian

Ada dua konsep penelitian yang peneliti tuliskan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini yakni pendalilan usaha hotel syariah dan sertifikasi usaha hotel syariah. Masing-masing dari konsep ini sebagai bahan analisis sebagai berikut :

1. Pendalilan Usaha Hotel Syariah

Pendalilan adalah asal kata dari dalil, yakni keterangan yang dijadikan bukti atau alasan suatu kebenaran.¹⁰ Atau mendalilkan yakni mempertahankan pendapat dengan alasan.

¹⁰ Deni Sugondo, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa, 2008. h, 1293.

Hotel Syariah merupakan gabungan antara kata Hotel dan Syariah, yang mana hotel merupakan jenis akomodasi yang dibangun untuk memberikan jasa pelayanan dan produk kamar kepada wisatawan. Jasa pelayanan yang diberikan dapat berupa jasa pelayanan kantor depan, reservasi kamar, fasilitas pelengkap akomodasi, kolam renang, dan biasanya dibangun di daerah kawasan wisata.¹¹

Sedangkan Syariah merupakan asal kata dari Syariat, yaitu hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia¹², hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al-quran dan hadis. Syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang diatur fatwa dan/atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia.

Usaha Hotel Syariah adalah usaha hotel yang penyelenggaraannya harus memenuhi kriteria Usaha Hotel Syariah sebagaimana dimaksud dalam Permen Parekraf.¹³

Sebagaimana yang dimaksudkan dalam Permen Parekraf No 2 tahun 2014, yaitu:

“Usaha Hotel adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan”.

“Syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana diatur fatwa dan/ atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia”.

¹¹I Gusti Bagus Rai utami, *Metodologi Penelitian Pariwisata dan Perhotelan*, Penerbit Andi, 2012, cet 1, h, 9.

¹²Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya : Karya Agung, h, 496.

¹³*Opcit*, Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif , Pasal 1.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat diartikan Hotel Syariah merupakan suatu bentuk bangunan yang menyediakan usaha akomodasi jasa berupa kamar, makanan, minuman maupun pelayanan sebagaimana lazimnya di mana pelayanan itu berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam guna memberikan suasana tenteram, nyaman, aman dan sesuai dengan kaidah Islam yang berlaku.

Pendalilan diri sebagai usaha syariah merupakan suatu bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh pemilik hotel merupakan secara khusus menggunakan sistim yang telah ditentukan oleh syara' untuk beberapa hal.

Dalam hal ini, penyelenggaraan hotel syariah, secara umum memiliki klasifikasi dengan dua penggolongan, yaitu Hotel syariah Hilal-1 dan Hotel Syariah Hilal-2. Kriteria mutlak yang berlaku bagi usaha hotel syariah hilal-1 adalah Aspek produk yang terdiri dari 8 unsur dan 27 sub unsur, aspek pelayanan yang terdiri dari 6 unsur dan 20 sub unsur, aspek pengelolaan yang terdiri dari 2 unsur dan 2 sub unsur.

Kriteria mutlak yang berlaku bagi usaha hotel syariah hilal-2 adalah aspek produk yang terdiri dari 11 (sebelas) unsur dan 40 (empat puluh) sub unsur, aspek pelayanan yang terdiri dari 10 (sepuluh) unsur dan 28 (dua puluh delapan) sub unsur; dan aspek pengelolaan yang terdiri dari 3 (tiga) unsur dan 6 (enam) sub unsur.¹⁴

¹⁴ Permen Parekraf No. 2 Tahun 2014, tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah pasal 7.

Pada dasarnya, usaha perhotelan merupakan satu dari sekian banyak usaha yang dapat mendatangkan keuntungan dari kegiatan muamalat, hal itu diperbolehkan, selama tidak ada dalil (nash) yang melarangnya secara tegas. Sesuai dengan kaidah di bawah ini menyatakan:

أَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْأَبَا حَتَّى إِلَّا بِدَلِيلٍ

Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”.

Kaidah ini didukung dengan kaidah lainnya seperti;

أَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ أَلَّا بَا حَتَّى

“Prinsip dasar dalam masalah manfaat adalah boleh”¹⁵

Meskipun demikian terdapat rambu-rambu Syariah yang bersifat umum dalam menjalankan mu’amalah (usaha ekonomi) termasuk usaha perhotelan, yakni:

- a. Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, atau menyewakan produk atau jasa yang secara keseluruhan maupun sebagiannya dilarang dalam ketentuan Syariah. Seperti dalam hal makanan, mengandung unsur babi; minuman khamar, perjudian, perzinaan, dll, yang semacam itu.
- b. Transaksi dilakukan berdasarkan jasa atau produk yang nyata, benar-benar ada. Tidak bersifat meragukan.

¹⁵Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta : Amzah, 2013, cet 3, h, 73.

- c. Tidak mengandung unsur kezhaliman, kemudharatan, kemungkaran, kemaksiatan maupun kesesatan yang terlarang dalam kaidah Syariah; baik secara langsung maupun tidak langsung.
- d. Tidak ada pula unsur penipuan, kecurangan, kebohongan, ketidak-jelasan *gharar*, resiko yang berlebihan dan membahayakan,
- e. Ada komitmen menyeluruh dan konsekuen dalam menjalankan perjanjian yang disepakati antar pihak-pihak terkait.¹⁶

Rambu-rambu syariah tersebut sudah barang tentu mengharuskan seorang pengusaha atau pemilik hotel syariah untuk terus dapat berkomitmen penuh dalam mentaati rambu-rambu bermuamalah secara syariah, sebab dengan begitu usaha yang dijalankan dapat sesuai yang dimaksudkan dengan ketentuan yang telah diperintahkan Allah. Perintah Allah untuk terus mendapatkan rezeki dari jalan yang baik agar yang dihasilkan menjadi baik pula.

Ada konsekuensi atas semua perbuatan yang dilakukan di dunia, termasuk dalam pencarian rezeki. Rambu-rambu syariah tersebut juga merupakan pengingat manusia atas batasan dalam berwirausaha dengan basis syariah. Selain sebagai pengingat juga sebagai pembatas bahwasannya hasil yang baik di dapat dari proses yang baik, yakni berwirausaha dengan menggunakan rambu-rambu yang dijelaskan di atas.

Memang bersifat umum, namun dari segi usaha perhotelan rambu-rambu yang dijelaskan di atas dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menjalankan

¹⁶Ruswandi, *Hotel Dengan Kaidah Syariah*, Makalah, <http://mentoringku.wordpress.com/2008/10/27/hotel-dengan-kaidah-syariah/> (Diakses 13 November 2016 Pukul 17.18).

usaha, sebab sangat mengarah pada hal-hal yang sifatnya tidak diperbolehkan dalam bermuamalah syariah, dan jika sudah berkaitan dengan syariah maka akan menjadi mutlak.

2. Sertifikasi Usaha Hotel Syariah

Proses sertifikasi usaha hotel syariah sudah diatur dalam Permen Parekraf No. 2 Tahun 2014. Secara jelas sudah dijelaskan proses audit dalam pencapaian sertifikasi di pasal 7 ayat (1), (3) dan (4), yakni sebagai berikut :

Ayat (1),

Untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Hotel Syariah, harus dilakukan penilaian terhadap:

- (a) pemenuhan persyaratan dasar; dan
- (b) pemenuhan dan pelaksanaan Kriteria Mutlak Usaha Hotel Syariah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Ayat (3)

Kriteria Mutlak yang berlaku bagi Usaha Hotel Syariah Hilal-1, dan terhadapnya harus dilakukan penilaian, meliputi :

- (a) aspek produk yang terdiri dari 8 (delapan) unsur dan 27 (dua puluh tujuh) subunsur;
- (b) aspek pelayanan yang terdiri dari 6 (enam) unsur dan 20 (dua puluh) subunsur; dan
- (c) aspek pengelolaan yang terdiri dari 2 (dua) unsur dan 2 (dua) subunsur.

Ayat (4)

Kriteria Mutlak yang berlaku bagi Usaha Hotel Syariah Hilal-2, dan terhadapnya harus dilakukan penilaian, meliputi :

- a) aspek produk yang terdiri dari 11 (sebelas) unsur dan 40 (empat puluh) subunsur;
- b) aspek pelayanan yang terdiri dari 10 (sepuluh) unsur dan 28 (dua puluh delapan) subunsur; dan
- c) aspek pengelolaan.

Jadi sebelum dilakukan penerbitan, harus dilakukan audit seperti penjelasan dalam pasal di atas. Audit yang dimaksud adalah penilaian usaha hotel syariah terhadap produk, pelayanan dan pengelolaan yang ada dalam sebuah usaha hotel syariah. Dalam penilaian pun ada dua kriteria yakni mutlak dan tidak mutlak, hanya saja dalam proses penilaian kriteria tidak mutlak tidak menjadi acuan penilaian guna sertifikasi usaha hotel syariah tersebut.

Penerbitan sertifikat halal bagi usaha hotel syariah dilakukan dengan melalui beberapa audit untuk menilai terhadap produk, pelayanan dan pengelolaan. Penerbitan dilakukan oleh DSN-MUI yang terkait dengan penyeleksian usaha hotel syariah. Proses sertifikasi akan segera ditindaklanjuti apabila pengusaha mendaftarkan diri sebagai usaha hotel syariah.

Sebab setelah adanya penerbitan sertifikat, usaha hotel syariah akan memiliki hak mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari kementerian pariwisata dan DSN-MUI terkait. Kementerian dan DSN-MUI memiliki kewajiban dalam pembinaan dan pengawasan rutin terhadap usaha hotel syariah tersebut seperti dalam penjelasan pasal 12 ayat (1) menyatakan kementerian dan Majelis Ulama Indonesia secara bersama-sama melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha hotel syariah. Itu artinya dalam keduanya memiliki hak dan kewajiban yang harus terpenuhi.

Namun apabila usaha hotel syariah tidak mendaftarkan diri dan tidak bersertifikat maka itu menjadi kendala dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara keduanya.

Di kota Palangka Raya ada hotel yang beroperasi dengan sistim syariah namun dalam pelaksanaannya hotel yang mendalilkan diri sebagai hotel syariah ini belum bersertifikat.

Penyelenggaraan merupakan unsur terpenting dalam pencapaian tersertifikasinya sebuah usaha hotel syariah, sebab penyelenggaraan yang telah sesuai dengan apa yang telah tertulis dalam pedoman penyelenggaraan akan memperoleh sertifikat yang menyatakan hotel dapat mendalilkan diri sebagai hotel syariah.

Dalam Permen Parekraf No. 2 Tahun 2014 pasal 1 ayat (9) menyatakan bahwa :

Sertifikasi Usaha Hotel Syariah adalah proses pemberian sertifikat pada usaha hotel melalui audit untuk menilai kesesuaian produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel dengan kriteria Usaha Hotel Syariah.

Dan ayat (10)

Sertifikat Usaha Hotel Syariah adalah bukti tertulis yang diberikan oleh DSN-MUI pada usaha hotel yang telah memenuhi penilaian kesesuaian kriteria Usaha Hotel Syariah.

Hasil penilaian kesesuaian atas produk, pelayanan dan pengelolaan hotel syariah ini dibuktikan secara langsung melalui sertifikat yang diberikan oleh DSN-MUI, seperti halnya dalam pasal 10 dijelaskan bahwa penilaian atas pemenuhan kriteria mutlak yang berlaku bagi usaha hotel syariah dalam rangka sertifikasi dan penerbitan sertifikat usaha hotel syariah, diselenggarakan oleh DSN-MUI. Ini memberikan arti penting dalam sebuah usaha jasa pelayanan yang mendalilkan diri sebagai syariah.

Selain memberikan sertifikat setelah dilakukan penilaian, DSN-MUI juga memiliki tugas dalam pembinaan dan pengawasan bersama kementerian terkait. Pembinaan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan advokasi tentang kebijakan dan program yang menyangkut usaha hotel syariah. Sedangkan pengawasan dilakukan melalui kegiatan evaluasi terhadap penyelenggaraan usaha hotel syariah, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1), prosedur untuk mendapatkan Sertifikat diperoleh melalui penilaian yang dilakukan oleh DSN-MUI untuk keperluan penerbitan sertifikat, penilaian harus dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan dasar dan pemenuhan dan pelaksanaan kriteria mutlak usaha hotel syariah. Kriteria tidak mutlak yang berlaku bagi usaha hotel syariah, tidak mempengaruhi penilaian dalam proses sertifikasi usaha hotel syariah dan tidak memiliki dampak dalam penggolongan usaha hotel syariah. Apabila kriteria tidak mutlak seperti yang tertera dalam lampiran pedoman penyelenggaraan pun dipenuhi oleh pemilik hotel maka itu hanya menjadi nilai lebih hotel tersebut, namun tidak mempengaruhi audit untuk menilai dalam proses sertifikasi.

Sertifikat merupakan sebuah bentuk kepastian hukum yang diberikan penyedia layanan untuk pengguna layanan, dalam hal ini adalah para tamu. Dalam bentuk sertifikat, para tamu akan merasa aman dalam menggunakan usaha jasa layanan ini karena segala bentuk penilaian kriteria boleh dan tidak diperbolehkannya produk, pelayanan dan pengelolaan yang ada dalam usaha hotel syariah di nilai dalam bentuk sertifikat yang dikeluarkan oleh DSN-MUI ini.

C. Kerangka Teori

Ada empat teori yang peneliti jadikan dasar untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, yakni teori *keberlakuan hukum*, teori *kepastian hukum*, teori *masalah*. Masing-masing dari empat teori yang digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Keberlakuan Hukum

Berlakunya Hukum dapat ditilik dari berbagai perspektif, perspektif filosofis, yuridis, dan sosiologis. Perspektif filosofis, berlakunya hukum jika sesuai dengan cita-cita hukum. Perspektif yuridis, berlakunya hukum jika sesuai dengan kaidah yang lebih tinggi (demikian teori stufenbau dari Hans kelsen) atau terbentuknya sesuai dengan cara-cara yang ditetapkan (demikian menurut W.Zevenbergen). Sedangkan berlakunya hukum dari perspektif sosiologis menurut Purnadi purbacaraka dan Soerjono soekanto, intinya adalah efektivitas hukum.¹⁷

Suatu kaidah hukum dinyatakan berlaku secara filosofis, apabila sudah sesuai dengan nilai-nilai yang hidup, dengan cita/kehendak dan jiwa dari masyarakat Indonesia. Sementara itu keberlakuan hukum secara yuridis, di sini terdapat tiga paradigma Zevenbergen, Hans Kelsen dan Logemann. Menurut Zevenbergen peraturan hukum itu baru dapat dikatakan berlaku secara yuridis apabila dibuat melalui prosedur/tata cara pembuatan peraturan hukum sebagaimana yang telah ditetapkan. Sementara menurut Hans Kelsen, peraturan

¹⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014. h, 135.

hukum itu berlaku secara yuridis apabila sesuai dengan peraturan hukum lainnya yang kedudukannya lebih tinggi dari peraturan hukum tersebut. Sedangkan bagi Logemann, hukum itu memiliki keberlakuan secara yuridis apabila dalam rumusannya telah mengandung hubungan antara sebab/kondisi dengan akibat/konsekuensi. Sementara itu keberlakuan kaidah hukum secara sosiologis, menunjukkan makna kepada penerimaan masyarakat yang dapat dibedakan atas penerimaan melalui teori pengakuan dan melalui teori paksaan.¹⁸

Berdasarkan hal tersebut, suatu hukum dapat berlaku dengan baik apabila ketiga elemen filosofis, yuridis dan sosiologis dapat berjalan secara beriringan di tengah-tengah masyarakat.

Jika ada orang yang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum (normatif) berhasil atau gagal mencapai tujuannya, biasanya diukur dari apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Pengaruh yang dihasilkan bisa positif atau negatif. Pengaruh positif berlakunya hukum kita sebut saja efektivitas, sedangkan pengaruh negatif kita sebut saja dampak.

Dalam menentukan perspektif tujuan suatu kaidah hukum, tergantung pada kehendak peneliti dari perspektif mana tujuan dikaji, karena tujuan kaidah hukum merupakan dasar untuk mengukur pengaruh hukum baik positif (efektivitas) maupun negatif (dampak) terhadap sikap atau perilaku masyarakat.

¹⁸Muhammad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama, cet. ke-1, 2012., h. 31-33.

Dalam hal penelitian ini, teori keberlakuan hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana dan sejauh mana peraturan mengenai usaha hotel syariah dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat, terutama pihak-pihak yang terkait dalam peraturan.

2. Teori Efektivitas Hukum

Penelitian hukum yang hendak menelaah efektivitas suatu peraturan perundang-undangan (berlakunya hukum) pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum.

Ideal hukum menurut Donald Black adalah kaidah hukum yang dirumuskan dalam undang-undang atau keputusan hakim (*Law in books*). Dengan merujuk *Principle of effectiveness* dari Hans Kelsen, realitas hukum artinya orang seharusnya bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan tata kaidah umum. Atau dengan kata lain, realitas hukum adalah hukum dalam tindakan (*Law in Action*).¹⁹

Agar terwujudnya perilaku yang sesuai dengan hukum, menurut Friedmen ada tiga unsur penegakan hukum. Ketiga unsur itu, meliputi struktur, substansi, dan budaya hukum.²⁰

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup yang dianut dalam suatu masyarakat.

¹⁹Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta : PT RajaGrafindo, 2013. h, 305.

²⁰*Opcit*, h, 306.

Dalam hal penelitian ini, teori efektivitas hukum digunakan untuk menganalisa dan mengukur pengaruh hukum positif dalam peraturan menteri dan ekonomi kreatif mengenai penyelenggaraan usaha hotel syariah.

3. Teori Kepastian Hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan setiap orang menginginkan dapat ditetapkannya hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi.²¹

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²² Menurut Utrecht, kepastian hukum ialah adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.²³

Teori ini digunakan untuk menganalisis tentang ada tidaknya kepastian hukum yang didapatkan oleh tamu ketika sebuah hotel telah memiliki sertifikat

²¹Titik triwulan tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2006, h, 227.

²²Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, h. 158.

²³Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999. h, 23

kehalalan sebuah usaha hotel yang berbasis syariah, dan juga untuk menganalisis bagaimana sebuah sertifikat usaha hotel syariah dapat memperkuat keberadaannya di mata hukum.

Dalam kehidupan manusia, hukum itu adalah alat untuk mencapai tujuan, sementara tujuannya sendiri adalah keadilan sehingga untuk apa mengorbankan tujuan demi alat. Hukum, menurut Prof. Subekti, S.H. melayani tujuan negara dengan menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”.

Ditegaskan selanjutnya, bahwa keadilan itu kiranya dapat digambarkan sebagai suatu keadilan keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati orang, dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan. Keadilan selalu mengandung unsur penghargaan, penilaian atau pertimbangan dan karena itu ia lazim dilambangkan dengan suatu neraca keadilan. Dikatakan bahwa keadilan itu menuntut bahwa “dalam keadaan yang sama tiap orang harus menerima bagian yang sama pula”.²⁴ Dengan demikian maka dapat dilihat bahwa hukum tidak saja harus mencarikan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, untuk mendapatkan “keadilan” tetapi hukum juga harus mendapatkan keseimbangan lagi antara tuntutan keadilan tersebut dengan tuntutan ketertiban atau kepastian hukum.

Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat akan tercapai dengan sendirinya.²⁵

²⁴PC.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia Jilid I*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, h. 14.

²⁵*Opcit*, Titik triwulan tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, h, 227.

4. Teori Maslahah

Dilihat dari bentuk lafalnya, kata *al-maslahah* adalah kata bahasa arab yang berbentuk mufrad (tunggal). Sedangkan bentuk jamaknya adalah *al-mashalih*²⁶. Jumhur ulama berpendapat, setiap hukum yang ditetapkan oleh *Nash* atau *Ijma* didasarkan atas hikmah dalam bentuk meraih manfaat atau kemaslahatan dan menghindarkan *mafsadah*.²⁷

Imam Al-Ghazali mengemukakan, pada dasarnya (secara bahasa atau urf) kata *mashlahah* menunjuk pengertian meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan (bahaya). Sedangkan Izzuddin bin Abdul Aziz bin Abdussalam menjelaskan, *al-mashlahah* masing-masing terdiri dari empat macam, yaitu kelezatan, sebab-sebabnya, kebahagiaan, dan sebab-sebabnya.

Maslahat adalah suatu teori yang menjelaskan tentang manfaat yang ditetapkan syar'i untuk para hambanya yang meliputi pemeliharaan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta.²⁸

Al-Ghazali dalam kitabnya yakni *Al-Mustashfa min Ilmi al Ushul* menguraikan *Al-Mashlahah* dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil *syara'*. Ia menyatakan:

“Maslahat dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara’ terbagi menjadi tiga macam: maslahat yang dibenarkan oleh syara’, maslahat yang dibatalkan oleh syara’, dan maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara (tidak ada dalil khusus).

²⁶ Al-Mashalih artinya mengambil yang baik dan meninggalkan yang buruk.

²⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta : AMZAH, 2011, Cet. 2. h, 206.

²⁸ Anonim, <http://alwi-ushulfiqh.blogspot.co.id/2010/04/maslahat.html> diakses pada tanggal 19 Maret 2017 pukul 6.47 WIB.

Maslahat itu ada tiga: Maslahat yang dibenarkan/ditunjukkan oleh nash/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan *maslahat mu'tabarah*. Maslahat semacam ini dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penetapan hukum Islam dan termasuk ke dalam kajian qiyas. Dalam hal ini para pakar hukum Islam telah konsensus, maslahat yang dibatalkan/digugurkan oleh nash/dalil tertentu.

Inilah yang dikenal dengan *maslahat mulgah*. Maslahat semacam ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini para pakar hukum Islam juga telah konsensus, maslahat yang tidak ditemukan adanya dalil khusus/tertentu yang membenarkan atau menolak/menggugurkannya. Maslahat inilah yang dikenal dengan *maslahah mursalah*. Para pakar hukum Islam berbeda pendapat apakah *maslahah mursalah* itu dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam ataukah tidak.²⁹

Berdasarkan tingkatannya, maslahat dapat dibagi kedalam tiga tingkatan, yaitu :

- a. *Dharuriyah*, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi kemaslahan mereka.³⁰ Pengabaian terhadap *maslahah dharuriyah* dapat berakibat pada terganggunya kehidupan dunia, hilangnya kenikmatan dan turunnya azab akhirat. Maslahah dharuriyah disyari'atkan untuk melindungi dan menjamin kelestarian agama, melindungi jiwa, akal, keturunan, melindungi harta. Contoh mewajibkan menuntut ilmu, mengharamkan meminum minuman keras, dan lain-lain.

²⁹ *Opcit*, Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, h, 304.

³⁰ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, h. 122.

b. *Hajiyah*, yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Pengabaian terhadap masalah hajiyat tidak menimbulkan ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia, tetapi akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. dalam rangka merealisasikan masalah hajiyah ini Allah mensyari'atkan berbagai transaksi, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan memberikan beberapa keringan hukum (*rukhsah*), seperti kebolehan menjamak dan mengqashar shalat bagi musafir, dan lain-lain.

c. *Tahsiniyah*, yaitu tindakan dan sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan makarimul akhlak serta memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, adat, dan muamalat. Misalnya mengenakan pakaian yang bagus-bagus ketika sholat, pengharaman makanan-makanan yang buruk atau menjijikan, dan lain-lain.³¹

Dalam hal penelitian ini, teori digunakan untuk menganalisis melalui tingkatan masalah bagaimana suatu Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah dapat berjalan sesuai dengan syariat yang dibuktikan oleh sertifikat dan mengarah pada kemanfaatan bagi semua dan merujuk pada tingkat masalah dharuriyah, hajiyah ataupun tahsiniyah.

D. Kerangka Berpikir

Penelitian tentang penyelenggaraan usaha hotel syariah ini menyinggung tentang sesuatu yang telah diatur dapat dijalankan oleh sekelompok masyarakat yang berkaitan. Dalam hal ini hotel berbasis syariah.

³¹Suwarjin, MA., *Ushul Fiqh*, Yogyakarta : Teras, 2012, h.142-143.

Bahwa dalam penyelenggaraan usaha hotel syariah, proses sertifikasi untuk pencapaian perolehan sertifikat sangat berpengaruh penting untuk sebuah hotel tersebut, dikatakan penting karena dalam hukum sebenarnya, sertifikat dapat berperan sangat penting dalam kepastian hukum bagi masyarakat tertentu dalam hal ini tamu, kepastian hukum bagi penyelenggara usaha hotel syariah juga berperan penting dalam proses keberlakuan hukum dan efektivitas hukum bagi yang menyelenggarakan, menjadi masalah bagi semua pihak yang terkait.

Di kota Palangka Raya, berdiri sebuah hotel berbasis syariah bernama Obelix Hotel Syariah. Pada awal mula pembangunan Obelix Hotel Syariah ini merupakan hotel yang dibangun atas keinginan pemilik hotel untuk memiliki hotel yang tentram dan memiliki stigma baik di pandangan masyarakat awam mengenai hotel. Hotel yang dibangun sejak tahun 2011 lalu dan beroperasi hingga kini ini merupakan hotel berbasis syariah. Namun di sisi lain, meskipun hotel telah menerapkan sistim syariah sejak tahun 2011, Obelix Hotel Syariah ini belum tercatat sebagai hotel syariah karena belum memiliki sertifikat dan mendapat sertifikasi dari kementerian yang bersangkutan. Berdasarkan Permen Parekras No. 2 Tahun 2014 pasal 11 dijelaskan bahwa pengusaha hotel yang telah memperoleh sertifikat hotel syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI saja yang dapat mendalilkan diri sebagai hotel syariah. Selanjutnya dalam pasal 15 dijelaskan bahwa pengusaha hotel yang belum memperoleh sertifikat usaha hotel syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, namun telah menyelenggarakan dan/atau mendalilkan diri sebagai usaha hotel syariah pada saat berlakunya Peraturan

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya peraturan menteri tersebut.

Jika dilihat sejak 2011 hotel telah mendalilkan diri sebagai syariah dan Permen Parekraf No. 2 beredar sejak 2014 lalu maka seharusnya Obelix Hotel Syariah wajib mematuhi seperti apa yang telah dijelaskan di pasal 15 tersebut.

Dalam hal tersebut sangat diperlukan adanya kesadaran hukum pada pemilik hotel untuk mematuhi aturan yang telah berlaku.

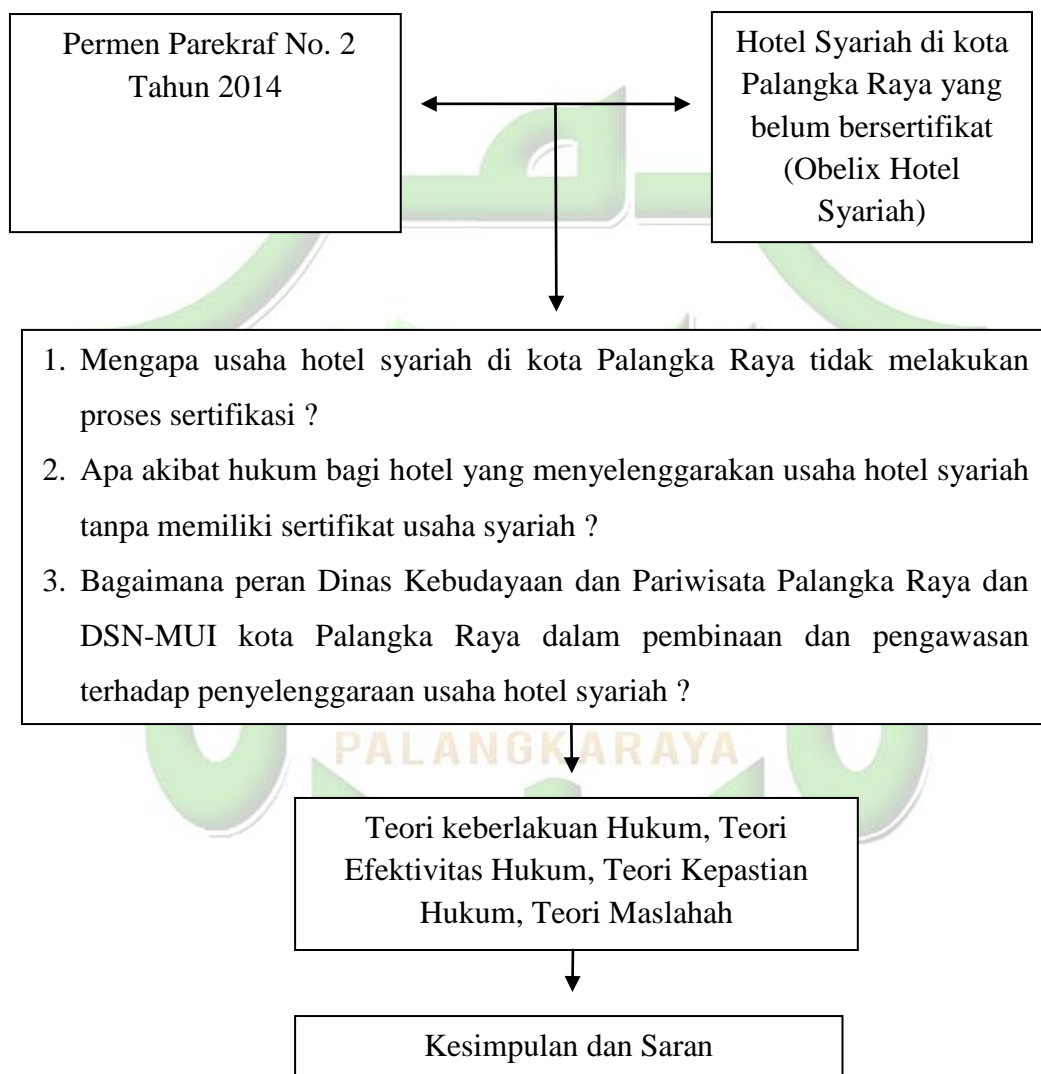
Dalam masalah memiliki beberapa tingkatan sesuai dengan kebutuhannya dan kepentingannya. Ini tergantung pada tingkatan masing-masing, masalah suatu kepentingan dapat dilihat dari apa yang menjadi kepentingan suatu perilaku. Dalam hal ini, usaha hotel syariah merupakan suatu bentuk masalah pada tingkat tahsiniyah, karena berkaitan dengan muamalah.

Selanjutnya, selalu ada akibat hukum bagi suatu aturan yang tidak dijalankan dengan semestinya. Namun dalam aturan yang tidak dijalankan dapat dipastikan selalu ada peran yang tidak sesuai tempatnya. Tergantung pada kasusnya. Dalam proses sertifikasi usaha hotel syariah misalnya, apabila suatu hotel telah memiliki izin dalam bidang ini, maka sertifikasi menjadi teramat penting bagi usaha tersebut karena untuk memberikan kepastian hukum antara pemberi izin, yang meminta izin dan yang menikmati layanan yang telah berizin. Diperlukan.

Selain diperlukan kesadaran hukum dari pemilik, untuk mencapai penyelenggaraan usaha hotel syariah yang sesuai ini juga diperlukan peran pihak terkait seperti kementerian dan DSN-MUI dalam pembinaan dan pengawasan

sehingga tercapainya suatu keberlakuan hukum, keefektivitasan hukum dan kepastian hukum bagi pemilik hotel.

Untuk lebih jelasnya, kerangka berpikir peneliti dalam penelitian ini dapat digambarkan pada **Bagan 1** sebagai berikut :



Gambar 1.1 : Kerangka Berpikir peneliti mengenai Pendalilan Usaha Hotel Syariah Tanpa Sertifikasi di kota Palangka Raya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, dan termasuk dalam kategori penelitian hukum sosiologis. Dalam buku Drs. J. Supranto dikatakan bahwa perbedaan penelitian hukum yang normatif dan sosiologis terletak pada pendekatannya (desainnya).³² Ini sejalan dengan pemikiran Dr. Sabian Utsman, Drs, S.H, M.Si bahwa penelitian hukum sosiologis menekankan langkah-langkah penelitian hukum sebagai fakta sosial (*socio-legal*) yang menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan, dan analitis yang bersifat empiris atau yang lebih dikenal dengan *socio-legal research*.³³

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.³⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus untuk menggali penyelenggaraan usaha hotel syariah yang tidak memiliki sertifikat di kota Palangka Raya dalam hal ini Obelix Hotel Syariah.

³²Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Pt Asdi Mahasatya, 2003. Cet 1, h,5.

³³Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, cet 1, h, 2.

³⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2014, Cet 9, h, 134.

C. Waktu dan tempat penelitian

Waktu penelitian dilakukan sejak Januari hingga Oktober dan bertempat di Obelix Hotel terletak di Jl. Rajawali km 2, Jekan Raya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Jl. Tjilik Riwut Km. 2,5, Kota Palangka Raya, MUI Kota Palangka Raya di Jl. G.obos Palangka Raya.

D. Subjek dan objek penelitian

Subjek adalah bagian kalimat yang menunjuk pelaku, tokoh, sosok sesuatu hal, atau suatu masalah yang menjadi pokok pembicaraan.³⁵

Dalam teknik penentuan Subjek, peneliti menggunakan beberapa subjek. Pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atas sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.³⁶ Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik Obelix Hotel, Pelaksana bidang pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan ketua MUI kota Palangka Raya.

Objek dalam penelitian ini adalah Pendalilan Usaha Hotel Syariah Tanpa Sertifikasi di kota Palangka Raya.

E. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara Wawancara, Observasi dan dokumentasi. Karena dalam hal ini peneliti memasuki lapangan yang luas,

³⁵Mila, *Pembelajaran Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta : Kanwa Publisher, 2011, Cet I, h, 67.

³⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2006, h, 106.

sehingga tidak mengetahui apa yang tidak diketahui maka dari itu peneliti mengandalkan teknik-teknik penelitian Wawancara, observasi dan dokumen.³⁷

1. Wawancara

Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *Interview guide* (panduan wawancara).³⁸ Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit. Wawancara dapat dibedakan menjadi: Wawancara terpimpin, Wawancara bebas, Wawancara bebas terpimpin³⁹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara bebas terpimpin, yang mana ada tanya jawab bebas antara pewawancara dan responden yang telah di minta keterangan. Namun pewawancara juga membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang telah ditanyakan.

2. Observasi/pengamatan

Pengamatan yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian kualitatif, pengamatan dimanfaatkan sebesar-besarnya seperti yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln sebagai berikut:

³⁷Afifudin, dan Veni Ahmad Soebani, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012, cet 2, h, 81.

³⁸Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, h, 193.

³⁹Riduwan, M.B.A, *Skala Pengukuran Variabel-variabel penelitian*, Bandung: ALFABETA, 2011, cet 8, h, 29.

- a) Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung.
- b) Teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.
- c) Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.
- d) Sering terjadi ada keraguan pada peneliti, jangan-jangan pada data yang dijaringnya ada yang menceng.
- e) Teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit.
- f) Dalam kasus-kasus tertentu di mana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, pengamatan menjadi alat yang sangat bermanfaat.⁴⁰
- g) Dalam hal ini, peneliti mengamati bagaimana Obelix hotel syariah sebenar-benarnya menerapkan sistim syariah namun tidak memiliki sertifikat, adakah akibat hukum bagi penyelenggara usaha hotel berbasis syariah namun belum tersertifikasi, dan adakah peran dari MUI dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan usaha hotel syariah di kota Palangka Raya.

⁴⁰*Opcit*, Lexy J. Moleong, h, 125-126

3. Dokumentasi

Metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada umumnya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cendera mata, laporan dan sebagainya. Sifat utama dari data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.

Bahan dokumen secara eksplisit berbeda dengan literatur, tetapi kemudian perbedaan antara keduanya hanya dapat dibedakan secara gradual. Literatur adalah bahan-bahan yang diterbitkan, baik secara rutin maupun berkala. Sedangkan dokumenter adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan sebagai bahan dokumenter.

Dokumenter dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Dokumen Pribadi, adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, dan kepercayaan. Dokumen pribadi dapat berupa buku harian, surat pribadi.
- b) Dokumen resmi, adalah dokumen yang dapat dikatakan ekstern dan intern, intern dapat berupa memo, pengumuman, instruksi dan kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung di suatu lembaga dan

sebagainya. Dokumen ekstern berupa bahan-bahan informasi yang dikeluarkan suatu lembaga, seperti majalah, tabloit, media massa.⁴¹

Dalam hal ini peneliti menggunakan kebijakan sistem syariah yang diterapkan di hotel, brosur hotel dan dokumen tak terduga lainnya sebagai metode pengumpulan data penelitian berupa dokumen.

F. Penyajian data

Penelitian penulis yang berfokus pada penyelenggaraan usaha hotel syariah yang tidak bersertifikat dan disajikan dengan deskriptif kualitatif. Dalam buku Lexy J. Moleong Metode penelitian Kualitatif mengatakan bahwa pendekatan ini merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.⁴²

G. Metode Pengabsahan Data

Pengabsahan data penelitian ini menggunakan metode triangulasi data. Triangulasi data merupakan data atau informasi dari satu pihak diperiksa kebenarannya dengan cara memperoleh informasi dari sumber lain. Misalnya dari pihak kedua, pihak ketiga dan seterusnya dengan menggunakan metode berbeda. Tujuannya adalah membandingkan informasi tentang hal yang sama yang

⁴¹Burhan Bungin, *Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial*, Jakarta: Kencana, 2010 h, 121-12.

⁴²*Ibid*, h, 6.

diperoleh dari berbagai pihak agar ada jaminan tingkat kepercayaanya.⁴³ Hal ini merupakan sebuah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyelidikan dan teori. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan secara umum dan apa yang dikatakan secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang terkait.⁴⁴

H. Metode Analisis data

Analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data yang terkumpul (*data collection*). Adapun kegunaan analisi data adalah untuk mengatur,

⁴³*Opcit*, Afifudin,M.M dan Veni Ahmad Soebani, *Metode Penelitian Kualitatif*, h, 90.

⁴⁴Sabian Utsman, *Dasar-dasar sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h, 386-387.

mengurutkan dan mengelompokkan, memberi kode, serta mengkategorikan.⁴⁵

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan beberapa tahapan yaitu :

1. *Data reduction* atau pengurangan data, yaitu semua data yang terkumpul tersebut dipilih antara yang relevan dan yang tidak relevan. Data yang tidak sesuai ditinggalkan atau tidak dimasukkan didalam laporan penelitian.⁴⁶
2. *Data display* atau penampilan data, yaitu data yang sudah relevan tersebut disaring dan dituangkan dalam Bab IV dan Bab V sebagai laporan yang yang tersusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan kajian teori yang tersedia. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.⁴⁷
3. *Conclusion drawing/verification* atau menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dengan meneliti hasil penelitian sehingga data yang diambil tidak menyimpang dari data yang diperoleh atau dianalisis.⁴⁸

⁴⁵ *Opcit*, Lexy J Moleong, h. 78.

⁴⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, 2009, h. 92.

⁴⁷ *Ibid*, h. 95.

⁴⁸ Matthew B. Milles dkk, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI-Press, 1992, h. 19.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kota Palangka Raya

Sejarah pembentukan Pemerintahan Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor : Des. 52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959. Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain mempersiapkan

Kotapraja Palangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh Asisten Wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh J. M. Nahan.

Peningkatan secara bertahap Kecamatan Kahayan Tengah tersebut, lebih nyata lagi setelah dilantiknya Bapak Tjilik Riwut sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi. Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya, yang dipimpin oleh J.M. Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W.Coenrad dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka Raya.

Perubahan, peningkatan dan pembentukan yang dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya dengan membentuk 3 (tiga) Kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Palangka di Pahandut.
2. Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling.
3. Kecamatan Petuk Katimpun di Marang Ngandurung Langit.

Kemudian pada awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi 2 (dua) kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Pahandut di Pahandut.
2. Kecamatan Palangka di Palangka Raya.

Sehingga Kotapraja Administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 (empat) kecamatan dan 17 (tujuh belas) kampung, yang berarti ketentuan-

ketentuan dan persyaratan-persyaratan untuk menjadi satu Kotapraja yang otonom sudah dapat dipenuhi serta dengan disyahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965, Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1965 tanggal 12 Juni 1965 yang menetapkan Kotapraja Administratif Palangka Raya, maka terbentuklah Kotapraja Palangka Raya yang Otonom. Peresmian Kotapraja Palangka Raya menjadi Kotapraja yang Otonom dihadiri oleh Ketua Komisi B Dprgr, Bapak L.S. Handoko Widjoyo, para anggota Dprgr, Pejabat-pejabat Depertemen Dalam Negeri, Deputy Antar Daerah Kalimantan Brigadir Jendral Tni M. Panggabean, Deyahdak II Kalimantan, Utusan-utusan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan beberapa pejabat tinggi Kalimantan Lainnya.

Secara umum Kota Palangka Raya dapat dilihat sebagai sebuah Kota yang memiliki 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Kondisi ini, memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Palangka Raya dalam membangun Kota Palangka Raya. Kondisi ini semakin menantang lagi bila mengingat luas Kota Palangka Raya yang berada pada urutan ke-3 di Indonesia yaitu 2,687 Km².

Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113°30' - 114°07' Bujur Timur dan 1°35' - 2°24' LintangSelatan, dengan luas wilayah 2.678,51 Km² (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukitdengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Dengan Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Timur : Dengan Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Selatan : Dengan Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Barat : Dengan Kabupaten Katingan

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit dengan luas masing-masing 117,25 Km², 583,50 Km², 352,62 Km², 572,00 Km² dan 1.053,14 Km².

Di kota Palangka Raya hotel yang tercatat pada website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ada sekitar 76 hotel dengan berbagai jenisnya, mulai dari wisma, melati dan hotel berbintang. Data hotel yang tercatat tersebut sebagai berikut,

Tabel 1
Data Hotel di kota Palangka Raya Hingga April 2017

NO	NAMA HOTEL	KATEGORI HOTEL	ALAMAT
1	SWISSBEL HOTEL	BINTANG 4	JL. TJILIK RIWUT KM.5
2	AQUARIUS BOUTIQUE HOTEL	BINTANG 4	JL. IMAM BONJOL NO. 5
3	HOTEL LUWANSA	BINTANG 3	JL. G.OBOS
4	HOTEL NEO	BINTANG 2	Jl Tjilik Riwut Km 1 No 1 P.Raya
5	HOTEL DANDANG TINGANG	BINTANG 2	JL. YOS SUDARSO NO.1
6	AMARIS HOTEL	BINTANG 2	Jln. S.Parman No. 60 A P.Raya
7	HOTEL GRAND GLOBAL	BINTANG 2	Jln. Tjilik Riwut No. 11 P.Raya
8	HOTEL BATU SULI INTERNASIONAL	BINTANG 2	Jln. Raden Saleh No. 4 P.Raya
9	HOTEL FOVERE	BINTANG 2	Jln. G.Obos No 97 P.Raya
10	HOTEL NASCAR FAMILY	BINTANG 2	Jl Nyai Undang No. 04

11	HOTEL SAKURA	MELATI 3	Jln. A.Yani No. 87 P.Raya
12	HOTEL MINA	MELATI 3	Jln. Nias No. 17 P.Raya
13	HOTEL PUTIR SINTA	MELATI 3	Jln. Nias No. 15 P.Raya
14	HOTEL RACHMAN	MELATI 3	Jln. Dr. Murjani No.9 P.Raya
15	HOTEL HALMAHERA	MELATI 3	Jln. Halmahera No. 55 P.Raya
16	RUNGAN SARI RESORT	MELATI	Jln. Tjilik Riwut Km.36 P.Raya
17	HOTEL BANAMA TINGANG	MELATI	Jln. A.Yani No.37 P. Raya
18	HOTEL GLOBAL EXPRES	MELATI	Jln. A.Yani No. 51 P.Raya
19	HOTEL DIAN WISATA	MELATI	Jln. A.Yani No. 31 P.Raya
20	HOTEL YANTI	MELATI	Jln. A.Yani No. 82 A
21	HOTEL LAMPANG	MELATI	Jln, Irian No. 2 P.Raya
22	HOTEL MAHKOTA	MELATI	Jln. Nias No. 53 P.Raya
23	HOTEL PAYANG	MELATI	Jln. Nias No. 6 P.Raya
24	HOTEL PANARUNG	MELATI	Jln. Dr.Murjani No. 53 P.Raya
25	HOTEL SERASI	MELATI	Jln. Dr.Murjani No. 54 P.Raya
26	HOTEL SURYA KAHAYAN	MELATI	Jln. Diponegoro No. 35 P.Raya
27	HOTEL FONY	MELATI	Jln.KS.Tubun No. 28 A P.Raya
28	EDOTEL HOTEL KARTINI SMK NEGERI 3	MELATI	Jln. Dr,Wahidin Sudirohusodo
29	ARTZ HOTEL	MELATI	Jln. Seth Adji No.31 P.Raya
30	HOTEL MELATI	MELATI	Jln.Nias No. 15 P.Raya
31	HOTEL GRAND SAKURA	MELATI	Jln.RTA.Milono No. 107 Km 3,5
32	HOTEL AVICENNA	MELATI	Jln.Merak No. 1 P.Raya
33	CITY INN HOTEL	MELATI	Jln. Antang No. 9

			P.Raya
34	HOTEL ROYAL GLOBAL	MELATI	Jln. Tjilik Riwut Km 2,5 P.Raya
35	HOTEL TRIANA	MELATI	Jln. Rajawali No. 12 P.Raya
36	HOTEL MELATI WISATA	MELATI	Jln. RTA. Milono No. 12 A P.Raya
37	HOTEL SAHID TAMARA	MELATI	Jln. RTA.Milono Km 3,5 P.Raya
38	HOTEL MARIMAR	MELATI	Jln. Tjilik Riwut Km 2,5 No.243
39	HOTEL BINTANG	MELATI	Jln. Tjilik Riwut Km 13,5 P.Raya
40	HOTEL HAWAI	MELATI	Jln. Tjilik Riwut/ Jln Bubut No 03 Km 04 P.Raya
41	HOTEL DUTA NANSARUNAI	MELATI	Jln. Tjilik Riwut Km. 5,5
42	HOTEL RATAMA	MELATI	Jln. Tjilik Riwut Km 4 P.Raya
43	HOTEL ANISA DINA	MELATI	Jln. A.Yani No. 99 P.Raya
44	HOTEL PUTRA MANTYA	MELATI	Jln. Sulawesi No. 8A P.Raya
45	HOTEL AMAN	MELATI	Jln. Galaxsi II No. 9 P.Raya
46	HOTEL BATU SULI	MELATI	Jln. Raden Saleh No. 1 P.Raya
47	HOTEL FAIRUS	MELATI	Jln. Damang Leman No.9 P.Raya
48	HOTEL ANDO RAYA	MELATI	Jln.Yosudarso
49	PENGINAPAN ECO VILAGE	MELATI	Jln.Cilik Riwut Km 36 P.Raya
50	PENGINAPAN BENUA LIMA RAYA	MELATI	Jln. Tjilik Riwut
51	PENGINAPAN BRAVO	MELATI	Jln.Tjilik Riwut Km 12 P.Raya
52	HOTEL ADIDAS	MELATI	Jln. A.yani
53	HOTEL BARITO SWEET SHINTA	MELATI	Jln. RTA Milono Km. 4,5
54	HOTEL BINTANG HARAPAN	MELATI	Jln. A.Yani/ Flamboyan bawah
55	HOTEL NIRWANA	MELATI	Jln. RTA Milono
56	HOTEL PELANGI	MELATI	Jln. Adonis Samad

			No. 1
57	HOTEL PALANGKA	MELATI	Jln. G.Obos
58	HOTEL CEMPAKA KUIN	MELATI	Jln. Bali No. 11
59	HOTEL NYAI RINDANG	MELATI	Jln. Tjilik Riwut Km. 11
60	LOSMEN PAYANG	LOSMEN	Jln. Jawa No. 063 P.Raya
61	LOSMEN CANTIK	LOSMEN	Jln. Halmahera No. 22 P.Raya
62	LOSMEN KARAKATAU	LOSMEN	Jln.Karakatur No.16 P.Raya
63	WANGGA BELA HOME STAYI	HOME STAY	Jln.Rajawali IIB P.Raya
64	WISMA MALAWEN	WISMA	Jln.Bukit Raya XVI P.Raya
65	WISMA WAGGA WAGGA	WISMA	Jln.Batu Suli No. 24
66	WISMA TULIP GUEST HOUSE	WISMA	Jln. Menteng IV
67	WISMA EKA SINTA	WISMA	Jln. Set Adji No 128
68	WISMA WAGGA WAGGA	WISMA	Jln. Set Adji No
69	WISMA GRAHA KANATA	WISMA	Jln.Nyai Udang
70	WISMA EVANIA	WISMA	Jln.Tambun Raya No. 7 P.Raya
71	WISMA CEMPAKA	WISMA	Jln.Temanggung Tandang No.60.
72	GRAND PATRIA	WISMA	Jln.Moris Ismail
73	WISMA INTAN	WISMA	Jln.Tambun Raya
74	RUMAH AMANDA	GUEST HOUSE	Jln.Beruk Anggis No.22
75	HOTEL KALIMANTAN MEETING CENTER	–	Jln. Tjilik Riwut Km 36 P.Raya
76	HOTEL GREEN HOUSE ASRI	–	Jln. Mahir Mahar
JUMLAH			
JUMLAH HOTEL : 76			
JUMLAH KAMAR : 2383			
JUMLAH TEMPAT TIDUR : 3034			

Sumber : Website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya⁴⁹

⁴⁹<https://disbudpar.palangkaraya.go.id/hotel/> Diakses Pukul 09.30 tanggal 30 Agustus 2017

Hotel-hotel yang tercatat pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di atas adalah hotel yang mendaftarkan diri dan memiliki izin usaha pariwisata dibidang jasa pelayanan. Sebenarnya ada beberapa hotel/wisma/penginapan yang ada di kota Palangka Raya yang belum tercatat pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini karena kemungkinan kurangnya syarat perizinan, termasuk Obelix Hotel Syariah.

Dalam catatan BPS (Badan Pusat Statistik) Palangka Raya mengumumkan Rata-rata tingkat penghunian kamar (TPK) pada hotel berbintang di Kalimantan Tengah selama April 2017 tercatat 57,15 persen, menurun 9,82 poin dibandingkan Maret 2017 yang mencapai 66,97 persen. Berdasarkan klasifikasi hotel, TPK hotel bintang 2 sebesar 62,14 persen, bintang 3 sebesar 45,54 persen, dan bintang 4 sebesar 58,81 persen. Dibandingkan bulan sebelumnya, penurunan TPK terjadi pada seluruh klasifikasi hotel berbintang yakni bintang 2 (14,13 poin), bintang 3 (6,66 poin), dan bintang 4 (7,57 poin) dibandingkan bulan sebelumnya. Selama periode April 2016 sampai dengan April 2017, TPK hotel bintang cenderung fluktuatif. TPK terendah terjadi di Februari 2017 sebesar 47,83 persen, sedangkan TPK tertinggi terjadi di Maret 2017 sebesar 66,97 persen.⁵⁰

Tabel 2

**Perkembangan tingkat penghunian kamar (TPK) di Hotel berbintang
April 2016-April 2017**

Tahun	Bulan	TPK (%)				Perubahan Poin			
		B2	B3	B4	Rata2	B2	B3	B4	Rata2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

⁵⁰BPS Kalteng, Berita Resmi Statistik Provinsi Kalimantan Tengah No. 10/06/62 Th. XI, 2 Juni 2017 (Diakses 8 Juni 2017 Pukul 07.00)

2016	Apr	63,21	59,22	64,55	62,68	1,81	14,87	6,69	7,35
	Mei	60,88	40,25	63,49	56,39	-2,33	-18,97	-1,06	-6,29
	Juni	60,12	55,98	58,35	58,23	-0,76	15,73	-5,14	1,84
	Juli	51,92	54,96	56,93	54,72	-8,20	-1,02	-1,42	-3,51
	Agustus	55,02	63,20	54,98	57,20	3,10	8,24	-1,95	2,48
	Sep	51,23	53,52	52,09	52,18	-3,79	-9,68	-2,89	-5,02
	Okt	60,70	43,79	70,50	60,00	9,47	-9,37	18,41	7,82
	Nov	56,87	42,17	58,43	53,54	-3,38	-1,62	-12,07	-6,46
	Des	56,37	39,15	56,54	51,80	-0,50	-3,02	-1,89	-1,74
2017	Jan	68,28	39,11	42,75	52,20	11,91	-0,04	-13,79	0,40
	Feb	46,97	49,44	47,20	47,83	-21,31	10,33	4,45	-4,37
	Mar	76,27	52,20	66,38	66,97	29,30	2,76	19,18	19,14
	Apr	62,14	45,54	58,81	57,15	-14,13	-6,66	-7,57	-9,82
Jan-Apr 2016		49,64	46,79	55,58	51,22	-0,13	-0,68	-5,62	-1,25
Jan-Apr 2017		64,48	46,71	53,92	56,23	14,84	-0,08	-1,66	5,01

Rata-rata TPK hotel bintang selama Januari-April 2017 tercatat 56,23 persen atau meningkat 5,01 poin dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang hanya sebesar 51,22 persen. Kenaikan TPK hotel berbintang terutama berasal dari bintang 2 sebesar 14,84 poin. Sebaliknya, TPK hotel bintang 3 dan 4 relatif menurun masing-masing sebesar 0,08 poin dan 1,66 poin.

Berdasarkan data TPK animo masyarakat terhadap hotel berbintang di kota Palangka Raya cenderung berkembang, hal ini dapat berpotensi pula bagi perkembangan hotel syariah berbintang seperti Obelix Hotel Syariah.

2. Obelix Hotel Syariah

a. Profil Obelix Hotel Syariah

Obelix Hotel Syariah merupakan satu-satunya hotel yang berbasis syariah dari sekian banyak hotel yang berdiri dan beroperasi di kota Palangka Raya. Obelix Hotel Syariah telah menjalankan bisnisnya sejak beberapa tahun silam, yakni sejak 2011. Dari awal pembangunan, pengelolaan hotel ini sudah beroperasi dengan sistim syariah, hal ini dinyatakan secara langsung oleh pemiliknya. Pendirian Obelix Hotel Syariah ini dalam bentuk badan usaha berupa CV (*commanditaire vennootschap*).

Asal mula nama Obelix sendiri merupakan kesenangan pemilik hotel terhadap tokoh kartun bernama obelix, dalam perannya diceritakan bahwa obelix merupakan seseorang yang terpandang dan kaya. Sebab kesenangan beliau tersebut, beliau terinspirasi dan berharap usaha yang telah beliau namakan obelix juga dapat terpandang dalam hal ini di kenal oleh semua orang/diketahui semua orang sehingga dapat membuat usahanya lebih maju.

Sesuai sistem syariah yang dijalankan, pemilik hotel menginginkan usaha yang ia kelola baik di mata masyarakat awam, yang ketika seseorang menggunakan usaha jasanya maka aman dari hal-hal yang menurut pandangan masyarakat negatif.

Obelix Hotel Syariah adalah hotel berbintang 1 yang beralamat di Jl. Rajawali no. 37 km. 2 kec. Jekan Raya, kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Lokasi cukup strategis dengan berbagai keperluan tamu.

Hotel yang memiliki 24 kamar dengan 2 jenis kamar yakni 20 kamar superior dan 4 kamar deluxe ini juga memiliki pelayanan istimewa dan fasilitas yang unggul. Hotel ini menyediakan Wi-Fi gratis di semua kamar, TV, AC, ruangan bebas rokok, restoran, layanan kebersihan, dan segala hal yang berhubungan dengan kenyamanan tamu seperti halnya hotel pada umumnya, namun yang menjadikan hotel ini semakin istimewa di mata para wisatawan muslim adalah hotel ini menerapkan sistem syariah pada produk, pelayanan dan pengelolaannya.⁵¹

Menurut 9 dari 10 pengunjung yang pernah menginap di hotel ini menyatakan mereka puas dan senang terhadap pelayanan yang diberikan oleh hotel ini, mulai dari pelayanan kamar maupun sistem yang diterapkan. *Feedback* yang diberikan para tamu terhadap hotel sangat positif dan sangat baik, tamu yang terdiri dari berbagai daerah ini menyatakan kesenangannya dalam sebuah review tamu yang diratingkan menjadi sangat baik dalam sebuah penilaian komentar.⁵²

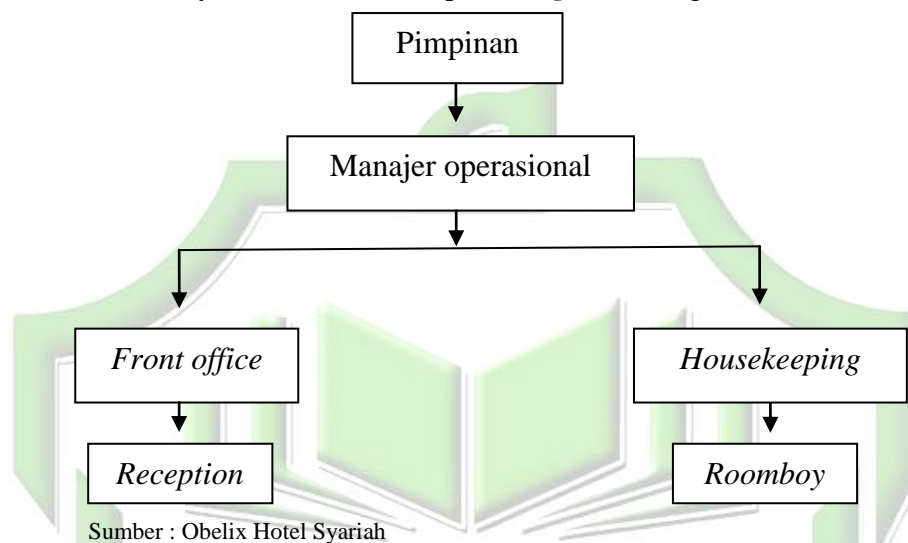
Sistem syariah yang diterapkan di Obelix memang menjadi nilai plus bagi penilaian pengunjung, karena dalam feedback konsumen terhadap hotel menyatakan senang terhadap penerapan sistem syariah. Beberapa akomodasi penerbangan pun telah bekerjasama dalam penerimaan tamu, sehingga Obelix Hotel Syariah telah memiliki pelanggan tetap yang rutin menginap di tempat ini.

⁵¹Tq (Resepsionis), Wawancara tanggal 2 juni 2017

⁵²*Opcit*, Review Tamu, <https://m.traveloka.com/hotel/indonesia/obelix-hotel-syariah-3000010003753>

b. Susunan Pengurus

Susunan pengurus Obelix Hotel Syariah, Obelix Hotel Syariah merupakan sebuah bisnis keluarga, maka tidak terlalu banyak organisasi kepengurusan dalam operasional hotel seperti organisasi hotel lainnya. Susunan pengurus yang ada pada Obelix Hotel Syariah ini adalah seperti **Bagan 2** sebagai berikut :



Bagan 2 Susunan pengurus Obelix Hotel Syariah

Dalam setiap kepengurusan ini memiliki tugas yang berbeda-beda sesuai bagiannya masing-masing, adapun tugas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan

Pimpinan Obelix Hotel Syariah ini adalah Bapak YL. Tugas pimpinan Obelix Hotel Syariah sesuai pendapat Magany adalah sebagai berikut :

- a. Memimpin usaha Obelix Hotel Syariah.
- b. Mengambil kebijakan untuk kemajuan Obelix Hotel Syariah.
- c. Bertanggung Jawab atas jalannya usaha Obelix Hotel Syariah.

- d. Mengangkat dan memberhentikan karyawan, serta memberi tugas kepada karyawan.⁵³

2. Manajer Operasional

Manajer operasional Obelix Hotel Syariah ini adalah Ibu NR. Tugas manajer operasional Obelix Hotel Syariah sesuai pendapat Magany adalah sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengkoordinir operasional Obelix Hotel Syariah.
- b. Bertanggung jawab atas perkembangan Obelix Hotel Syariah.
- c. Sebagai wakil dari pimpinan, manajer operasional juga bertanggung jawab dalam menerima dan memberhentikan karyawan.
- d. Bersama-sama dengan pimpinan membuat strategi dan mengevaluasi internal untuk perkembangan Obelix Hotel Syariah.⁵⁴

3. *Front Office*

Front Office atau kantor depan melaksanakan peran dan fungsi penting pada operasional hotel. Citra hotel yang baik ada pada departemen ini. Bagian ini sering diumpamakan sebagai jantung hotel atau tepatnya sebagai pusat kegiatan bagi hotel dan tamu. Sebab dari sinilah sumber informasi dan instruksi ke berbagai departemen terhadap jasa pelayanan kepada tamu diberikan. Tugas bagian *Front Office* Obelix Hotel Syariah sesuai pendapat Magany adalah sebagai berikut :

- a. Menerima pesanan kamar.

⁵³ Tq.

⁵⁴ Tq.

- b. Menangani kedatangan, pendaftaran, dan penempatan kamar tamu;
- c. Melayani selama tamu tinggal di hotel dan melaksanakan keberangkatan tamu.⁵⁵

4. *Housekeeping*

Housekeeping pada Obelix Hotel Syariah terdapat penggabungan antara *Roomboy* dan Public Area, tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab atas kebersihan kamar-kamar.
- b. Menyiapkan kamar bagi tamu yang akan melakukan check in.
- c. Memastikan stok perlengkapan kamar dan persediaan linen.
- d. Merapikan kembali kamar tamu yang telah check out.
- e. Membersihkan area sekitar hotel.⁵⁶

Obelix Hotel Syariah memiliki tata tertib yang harus ditaati bagi calon tamu yang akan menginap di hotel tersebut, yakni :

- a. Menyerahkan tanda bukti diri KTP/SIM/PASPOR.
- b. Deposit menginap minimal satu hari pertama.
- c. Tidak berbuat asusila, atau tidur sekamar dengan pasangan yang bukan mahram.
- d. Tidak diperbolehkan menerima tamu lawan jenis di dalam kamar.
- e. Menjaga ketertiban dan ketenangan lingkungan hotel.
- f. Membuang sampah pada tempatnya.
- g. Tidak berjudi, minuman keras, atau memakai narkoba di lingkungan hotel.
- h. Tidak meninggalkan barang berharga dikamar hotel.
- i. Dilarang membawa binatang peliharaan didalam kamar.
- j. Batas check out pukul 12.00.⁵⁷

⁵⁵Richard D Magany, *Modul Menyediakan Layanan akomodasi reception*, Jakarta : Erlangga, 2009. h, 10-11

⁵⁶*Opcit*, h, 12

⁵⁷Dokumen Obelix Hotel Syariah, Tata tertib hotel

Tata tertib wajib ditaati bagi semua tamu yang menginap di Obelix Hotel Syariah. Tata tertib yang dibuat juga merupakan kebijakan yang diambil oleh pimpinan hotel demi kebaikan hotel.

Meskipun tata tertib tersebut cenderung ketat, namun tidak mengurangi minat para pengunjung/tamu yang menginap pada Obelix Hotel Syariah, hal ini dapat dibuktikan dengan sejumlah tamu tetap/langganan dan perusahaan hasil kerjasama yang menjadi langganan di Obelix Hotel Syariah.⁵⁸ Data mengenai jumlah tamu ini pun dibuat dalam sebuah laporan untuk mengklasifikasikan presentase jumlah tamu perbulannya. Data perkembangan jumlah minat tamu obelix hotel syariah per januari 2016 – mei 2017 misalnya sebagai berikut :

Tabel 3

Data perkembangan Jumlah Tamu 2016-2017

Januari – Desember 2016

NO	BULAN	ROOM AVAILABLE	ROOM PAYABLE	OCCUPENCY	
1	Januari	744	447	60	%
2	Februari	696	400	47	
3	Maret	744	446	60	
4	April	720	553	74	
5	Mei	744	517	69	
6	Juni	720	474	66	
7	Juli	744	417	56	
8	Agustus	744	588	79	
9	September	720	47	66	
10	Oktober	744	536	72	
11	November	744	403	54	
12	Desember	744	413	56	

⁵⁸Tq (Resepsionis)

	Jumlah	759	
--	--------	-----	--

Sumber : Arsip Obelix Hotel Syariah.

Januari-Mei 2017

NO	BULAN	ROOM AVAILABLE	ROOM PAYABLE	OCCUPENCY	
1	Januari	744	375	50	%
2	Februari	672	433	64	
3	Maret	744	483	65	
4	April	720	367	51	
5	Mei	744	541	73	
Jumlah				303	

Sumber : Arsip Obelix Hotel Syariah.

Data yang peneliti cantumkan di sini gambaran minat tamu hotel di tahun 2016 menuju 2017, seperti halnya dengan bisnis-bisnis lainnya, nilai fluktuatif setiap bulannya juga dirasakan oleh bisnis usaha jasa pelayanan di Obelix Hotel Syariah ini. Di samping itu, minat terhadap hotel berbasis syariah ini dikatakan cukup baik di daerah seperti kota Palangka Raya ini. Masyarakat lokal maupun wisatawan cukup memberikan rasa kepercayaan terhadap Obelix Hotel Syariah.

Penerapan sistim syariah ini tidak megurangi minat para tamu yang hendak menginap di Obelix Hotel Syariah terbukti dengan data yang telah dicantumkan di atas setiap bulannya. Para tamu muslim maupun non muslim tidak merasa terganggu terhadap penerapan sistim syariah tersebut. Justru ada beberapa *feedback* yang menyatakan senang terhadap penerapan syariah dalam obelix hotel tersebut.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Data dari hasil penelitian pada penelitian ini didapatkan melalui observasi dan wawancara yang dilakukan oleh Peneliti di tiga tempat yakni Obelix Hotel, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Palangka Raya, dan MUI Kota Palangka Raya.

Wawancara dilakukan di tiga tempat dengan masing-masing satu tempat satu Responden, karena peneliti hanya mengambil informasi pada Responden yang kompeten di bidangnya saja.

1. Penyebab Usaha Hotel Syariah di Kota Palangka Raya Tidak Melakukan Proses Sertifikasi.

Berdasarkan wawancara terhadap Bapak YL selaku pemilik Obelix Hotel Syariah menyatakan bahwa tujuan menyelenggarakan usaha hotel syariah ini untuk beberapa hal-hal yang menyangkut pikiran buruk masyarakat seperti pandangan masyarakat terhadap hotel-hotel non syariah, sehingga belum ada niatan untuk proses sertifikasi. Pendalilan syariah dilakukan agar masyarakat semakin percaya dengan usaha yang beliau jalankan.

Selanjutnya beliau juga menjelaskan bahwa selama ini belum pernah mengetahui mengenai sertifikasi hotel syariah, menurutnya usaha yang telah dijalankan tersebut sengaja dibuat bersistem syariah untuk menjaga nama baik hotel dari stigma negatif masyarakat terhadap hotel-hotel konvensional pada umumnya, hal ini seperti dalam pernyataan beliau sebagai berikut :

Selama ini saya itu mbak, jalanin usaha ini dengan sistem syariah karena memang benar-benar ingin menjaga lingkungan usaha saya supaya baik

dalam nama dan pengelolaan nya saja, gak ada niat buat ngajuin sertifikat-sertifikat yang mbak maksud itu.⁵⁹

Dalam proses sosialisasi ini sendiri, pemilik hotel mengatakan belum pernah mengikuti sosialisasi maupun ada kabar mengenai sosialisasi mengenai peraturan tersebut. Dibuktikan di salah satu pertanyaan pada sebuah wawancara.

Selama ini, Bapak YL belum mengetahui mengenai Permen Parekraf No. 2 Tahun 2014 ini dan juga belum pernah mengikuti sosialisasinya.

Bapak YL mengatakan bahwa,

Belum ada yang namanya pemberitahuan adanya sosialisasi terkait peraturan tersebut, dan juga tidak ada kabar mengenai hal itu mbak.⁶⁰

Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menerangkan bahwa memang belum ada hotel di kota Palangka Raya yang mendaftarkan diri sebagai hotel syariah. Juga belum pernah melakukan sosialisasi mengenai penyelenggaraan usaha hotel syariah, sosialisasi yang pernah dilakukan pun tentang usaha jasa pelayanan secara umum bukan tentang usaha hotel syariah secara khusus.

Sementara itu juga diperjelas dengan sebuah wawancara dengan informan yakni resepsionis obelix hotel syariah,

Selama ini memang bapak (pemilik hotel) tidak pernah terlihat mengikuti sosialisasi mengenai peraturan yang berkaitan dengan hotel syariah sih, pernah beberapa waktu lalu dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu ada penawaran tapi tentang travel agent yang bisa diajak kerjasama gitu aja sih bukan tentang hotel syariah.

⁵⁹YL (pemilik obelix hotel) Wawancara pada tanggal 25 April 2017.

⁶⁰YL

Berdasarkan Observasi, Lingkungan hotel yang bapak YL kelola ini pun menerapkan beberapa peraturan yang dapat membuka stigma baik masyarakat terhadap usaha yang Bapak YL kelola, yakni menyerahkan tanda bukti diri ktp/sim/paspor, deposit menginap minimal satu hari pertama, tidak berbuat asusila, atau tidur sekamar dengan pasangan yang bukan mahram, tidak diperbolehkan menerima tamu lawan jenis di dalam kamar, menjaga ketertiban dan ketenangan lingkungan hotel, membuang sampah pada tempatnya, tidak berjudi, minuman keras, atau memakai narkoba di lingkungan hotel, tidak meninggalkan barang berharga dikamar hotel, dilarang membawa binatang peliharaan didalam kamar, batas check out pukul 12.00.

Pendalilan obelix hotel syariah ini dinyatakan beliau untuk menciptakan stigma baik pada masyarakat bahwa hotel yang beliau kelola tidak sama seperti hotel-hotel konvensional pada umumnya, hal ini sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Berdasarkan dokumen yang terdapat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Palangka Raya bahwa ternyata hotel obelix belum masuk pada daftar tersebut dan hal ini diperkuat dengan pernyataan informan bahwa pihak hotel memang memiliki izin usaha CV, IMB dan NPWP perusahaan pun ada namun tidak ada izin usaha pariwisata.

Berdasarkan paparan di atas dapat diketahui bahwa penyebab belum melakukan sertifikasi karena pihak hotel tidak pernah mendapatkan sosialisasi mengenai Permen Parekras No. 2 Tahun 2014 ini, sebab lainnya karena memang pihak hotel belum memiliki izin usaha pariwisata.

2. Akibat Hukum Usaha Hotel Syariah yang Tidak Melakukan Sertifikasi

Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.

Akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum diatur juga oleh hukum, meskipun akibat itu memang tidak dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan tersebut. Dalam hal ini siapa yang bertentangan dengan hukum harus mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan karena perbuatan itu. Jadi, karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum timbulah suatu perikatan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan.⁶¹

Akibat hukum tidak dilakukannya proses sertifikasi dapat dilihat dari aspek sosiologis yakni menurunnya animo masyarakat terhadap kejelasan pendalilan hotel tersebut. Aspek pada sisi sosiologis ini sangat berkaitan dengan kehidupan masyarakat karena sertifikat usaha hotel syariah ini hal yang terpenting dalam proses berlangsungnya usaha yakni dari masyarakat/konsumen/tamu pengguna jasa layanan kamar.

Dalam sebuah wawancara kepada responden dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bagian pelaksana bidang pariwisata menyatakan bahwa :

“Belum lama ini saya dan tim telah melakukan pendataan hotel dengan semua jenis dan tipenya, mulai dari hotel melati hingga hotel berbintang”

⁶¹Cst, Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Balai Pustaka, 2002. Cet 12, h, 90.

“Ada sekitar 69 hotel yang telah berdiri dan beroperasi di kota Palangka Raya. Jumlah ini didapatkan dari pendataan yang saya dan tim di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Palangka Raya lakukan.”⁶²

Setelah ibu Rina, S.sos menjelaskan jumlah hotel yang tersebar di kota Palangka Raya, peneliti menanyakan apakah dari semua hotel yang masuk dalam pendataan itu ada hotel syariah, dan ibu Rina menjawab,

“Untuk saat ini, belum ada yang mendaftarkan diri sebagai hotel yang memiliki izin usaha hotel syariah”.⁶³

Semua yang terdaftar di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Palangka Raya hanya yang mendaftarkan diri sebagai usaha hotel konvensional.

Ibu Rina, S.sos lebih lanjut mengatakan bahwa di Palangka Raya, memang belum ada yang benar-benar mendaftarkan diri sebagai usaha syariah.

Dalam wawancara tersebut, dinas terkait menyatakan memang belum ada satupun hotel di Palangka Raya yang mendaftarkan diri sebagai usaha hotel syariah yang legal. Dalam pernyataan beliau bahwa :

Tidak ada akibat hukum, karena ketika dia tidak mendaftarkan diri sebagai usaha hotel syariah maka kami (pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) tidak bertanggungjawab.⁶⁴

Jadi dalam hal ini mungkin tidak ada akibat hukum secara langsung, akibat hukum muncul dari proses berjalannya usaha tersebut di pandangan konsumen hotel.

⁶²Rina, S.sos (bagian pelaksana bidang pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Palangka Raya) wawancara pada tanggal 20 April 2017

⁶³Rina, S.sos

⁶⁴Rina, S.sos.

Hal ini senada pula dengan pernyataan dari sisi pemilik hotel bahwa selama menjalankan usaha tidak ada teguran dari dinas terkait mengenai pendalilan diri sebagai hotel syariah.

Bapak YL menerangkan bahwa

“Selama ini segalanya baik-baik saja tidak ada teguran yang mengarahkan dari dinas manapun”

Pernyataan tidak adanya teguran dari dinas ini karena pada dasarnya pemilik hotel yang mendalilkan diri sebagai syariah ini tidak mendaftarkan diri sebagai usaha hotel syariah kepada dinas terkait tersebut.

Dalam segi pandangan masyarakat sekitar menyatakan bahwa memang obelix hotel syariah cukup meragukan untuk dikatakan sebagai syariah sebab hanya pendalilan saja tidak ada bukti khusus bahwa memang benar hotel tersebut merupakan hotel syariah. Untuk kunjungan, berdasarkan dokumentasi data jumlah kunjungan tamu dari tahun ke tahun memang fluktuatif namun hotel cukup diminati.

3. Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan DSN-MUI dalam Pembinaan dan Pengawasan Hotel Terhadap Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

Menurut hasil wawancara terhadap pelaksana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ada perbedaan pemahaman antara Permen Parekraf No. 2 Tahun 2014

dan apa yang dikatakan oleh tim pelaksana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Palangka Raya.

Berdasarkan observasi pada web Dinas Kebudayaan dan pariwisata kota Palangka Raya pula memang tidak ada sedikitpun pembahasan atau pemberitahuan yang menyinggung mengenai aturan-aturan khusus tentang usaha hotel syariah. Hal ini semakin diperkuat dalam sebuah wawancara terhadap Responden Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Ibu Rina mengatakan bahwa

“untuk sejauh ini belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan hotel syariah, termasuk Peraturan Daerah nya juga tidak ada”.⁶⁵

Berdasarkan pernyataan tersebut, nampak bahwa pelaksana bidang pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Palangka Raya belum mengetahui adanya peraturan yang dibuat oleh kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif No. 2 Tahun 2014 ini.

Sosialisasi pembinaan usaha jasa pelayanan dibidang perhotelan ini ibu Rina mengatakan setiap 2 tahun sekali dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pusat atau provinsi melakukan pembinaan terhadap hotel namun non syariah.

Selama pendataan tidak ditemukan adanya usaha yang terindikasi syariah, ibu Rina, S.sos mengatakan bahwa :

Selama ini belum, tapi setiap 2 tahun sekali ada pembinaan dengan bentuk sosialisasi dari pusat provinsi mengenai usaha jasa pelayanan di bidang perhotelan ini.⁶⁶

Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pusat provinsi ini dilakukan untuk pengembangan dan pengetahuan para pemilik hotel mengenai beberapa hal yang

⁶⁵Rina, S.sos.

⁶⁶Rina, S.sos.

terkait dengan sesuatu yang baru yang harus diketahui oleh para pemilik hotel dalam hal ini hotel konvensional pada umumnya, bukan hotel syariah pada khususnya.

Untuk tahun 2017 ini juga telah dilaksanakan sosialisasi perda tentang penyelenggaraan pariwisata Nomor 10 Tahun 2017 yang mana perda ini salah satunya mengatur tentang prinsip penyelenggaraan usaha pariwisata. Sosialisasi dilakukan dihadapan camat, lurah, pelaku usaha wisata dan sejumlah tokoh masyarakat kota Palangka Raya.⁶⁷

Peran kedua pihak yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan MUI sangat diperlukan untuk pembinaan dan pengawasan pada hotel yang berbasis syariah.

Jika berbicara mengenai pengawasan yang dilakukan oleh MUI setempat, maka akan merujuk pada suatu tim yang sengaja dibentuk oleh MUI untuk proses pengawasan lembaga kesyariahan, yakni Dewan Syariah Nasional yang selanjutnya disebut DSN.

Dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap sekretaris yang namanya DSN, ini dibentuk oleh MUI induk atau wilayah yakni provinsi. Bapak Amanto mengatakan bahwa,

Ada DSN-MUI, hanya saja DSN-MUI tidak aktif, DSN-MUI ini dibentuk oleh MUI Wilayah (Provinsi) yang memiliki tugas merekomendasi, mengecek dan membina sejauh mana usaha syariah berjalan.⁶⁸

⁶⁷Alamsyah, <https://disbudpar.palangkaya.go.id/perda-ripparda-dan-perda-penyelenggaraan-kepariwisataan-diselenggaraan/> (diakses 05 september 2017 pukul 10.48)

⁶⁸Amanto Surya Langka (Sekretaris MUI Kota Palangka Raya) wawancara pada tanggal 18 mei 2017.

Ini berarti bahwa pembentukan DSN-MUI memang sudah dilakukan hanya saja dalam prosesnya, tugas dan wewenang DSN-MUI ini tidak aktif atau hanya akan aktif ketika dibutuhkan saja. Ini sejalan dengan pernyataan Bapak Amanto bahwa,

Pada dasarnya MUI ini memiliki sifat pasif, jadi jika hotel syariah itu tidak mendaftarkan diri, maka MUI tidak akan pernah tahu bahwa di Palangka Raya ada hotel yang mendalilkan diri sebagai syariah. Maka perlu inisiatif pemilik hotel yang mendalilkan diri sebagai syariah untuk mendaftarkan diri.⁶⁹

Sifat pasif ini juga mengarah pada tindakan koordinasi antar kedua pihak yang memiliki peran dalam pembinaan dan pengawasan ini. Dalam prosesnya, sebelumnya memang belum pernah sama sekali terjadi koordinasi antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan DSN-MUI ini disebabkan sifat pasif oleh MUI. Bapak Amanto mengatakan bahwa,

Selama ini belum pernah terjadi koordinasi, MUI hanya membina masyarakat muslim tapi tidak bisa mengintervensi secara langsung dengan dinas terkait.⁷⁰

Sekalipun akan terjadi koordinasi kedepannya, kemungkinan itu terjadi apabila sudah ada hotel yang benar-benar mendaftarkan diri sebagai hotel syariah yang bersertifikat. Koordinasi akan dilakukan dengan pengarahan dari dinas terkait bukan MUI yang mengadakan koordinasi.

Karena ini berkaitan dengan penerbitan sertifikat itu sendiri, dalam penerbitan sertifikat di pasal 10 ayat (1) Permen Parekraf No. 2 tahun 2014 dijelaskan pihak MUI lah yang memberikan sertifikat setelah dilakukannya

⁶⁹Amanto Surya Langka.

⁷⁰Amanto Surya Langka.

penilaian, sehingga ketika ada hotel yang benar-benar mendaftarkan diri maka setelah penerbitan akan diadakan pembinaan dan pengawasan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan MUI.

C. Analisis

1. Analisis Penyebab Usaha Hotel Syariah di Kota Palangka Raya Tidak Melakukan Proses Sertifikasi

a. Sosialisasi belum dilaksanakan

Secara eksplisit menurut analisa peneliti jika dilihat mengenai permasalahan pengetahuan pengusaha yang kurang mengenai peraturan ini terletak pada proses sosialisasi yang tidak dilaksanakan oleh pihak yang memiliki tanggungjawab dalam proses sosialisasi peraturan ini. Sehingga keberlakuan hukum dari sisi sosiologis tidak tercipta dengan baik karena keberlakuan hukum dari sisi sosiologis pada intinya adalah efektivitas hukum maka hukum positif pada Permen Parekras No. 2 Tahun 2014 belum berlaku sesuai dengan cita-cita hukum. Bahwa efektivitas hukum menurut friedman juga apabila substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dapat berjalan bersama secara beriringan, namun apabila salah satu atau ketiga unsur tersebut ada yang menyalahi maka tidak dapat disebut efektif.

Peneliti juga meyakini bahwa ada beberapa hal yang belum pengusaha ketahui mengenai aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengenai penyelenggaraan usaha hotel syariah bahwa pengusaha yang

mendalilkan diri sebagai usaha hotel syariah wajib menyesuaikan diri dengan peraturan menteri ini, seperti dalam pasal 15 menyatakan bahwa,

Pengusaha hotel yang belum memperoleh sertifikat usaha hotel syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, namun telah menyelenggarakan dan/atau mendalilkan diri sebagai usaha hotel syariah pada saat berlakunya peraturan menteri ini, wajib menyesuaikan diri dengan peraturan menteri ini dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya peraturan menteri ini.

Hal ini berkaitan erat dengan proses sosialisasi peraturan terhadap masyarakat sekitar, sangat erat kaitannya pula dengan proses keberlakuan hukum. Karena dalam proses sosialisasi sebuah peraturan mengajak masyarakat untuk mengetahui secara bersama tentang peraturan tersebut. Sehingga ketika masyarakat mengetahui secara baik peraturan yang telah di sosialisasikan maka akan terciptanya keberlakuan hukum baik secara filosofis, yuridis dan yang paling khusus secara sosiologis. Dikatakan secara khusus sosiologis karena ini akan merujuk pada keefektivitasan sebuah peraturan di tengah-tengah masyarakat.

Bisa dipastikan bahwa ketidaktahuan pemilik hotel terhadap peraturan semata-mata bukan kesalahan pemilik hotel, karena sosialisasi peraturan juga merupakan tanggung jawab pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan DSN-MUI kota Palangka Raya. Dimana ketika peraturan hendak diterbitkan di tengah-tengah masyarakat maka perlu sosialisasi mengenai peraturan tersebut, agar masyarakat yang terkait dapat mengetahui keberadaan peraturan, lebih-lebih kepada pemahaman masyarakat terhadap peraturan tersebut. Pada dasarnya suatu peraturan dikeluarkan di tengah-tengah masyarakat agar diterapkan dan

memberikan perubahan pada masyarakat itu sendiri.⁷¹ Karena pada dasarnya peraturan ini sasarannya selain pemilik hotel yang mendalilkan diri sebagai syariah dan juga calon pemilik hotel juga untuk masyarakat luas.

Selain itu, Perlu dorongan kuat dari beberapa pihak untuk keselarasan tanggung jawab ini, tanggung jawab dalam memberikan pengarahan yang terhadapnya akan tercipta pengetahuan dan pemahaman yang baik dari sisi pemilik usaha jasa pelayanan di bidang perhotelan ini maupun calon pemilik usaha jasa pelayanan di bidang perhotelan ini.

Meskipun pada sisi filosofis dan yuridis sudah terpenuhi namun jika satu elemen yakni sisi sosiologis tidak terpenuhi maka tidak akan tercipta proses keberlakuan hukum. Keberlakuan hukum merupakan proses berlakunya suatu hukum apabila ia sudah memenuhi tiga aspek keberlakuan hukum. Yang pertama yuridis, apabila pembuatan aturan sudah sesuai dengan semestinya, yang kedua filosofis apabila aturan berlaku sesuai dengan apa yang di cita-citakan, yang ketiga sosiologis apabila aturan sudah berlaku di tengah-tengah sasaran yaitu masyarakat.

Sertifikat usaha hotel syariah merupakan sebuah bentuk kepastian hukum bagi pengusaha dan tamu, karena sertifikat merupakan pembuktian yang legal dari hasil audit untuk menilai dari pihak yang telah dipercaya dalam penilaian. Ini penting bagi kedua pihak, pihak pemilik hotel dan tamu.

Disebabkan itulah, terjadi penyebab mengapa tidak tersertifikasinya usaha hotel syariah tersebut yakni yang pertama dari pihak pemilik hotel yang sama

⁷¹*Opcit*, sabian Utsman, *Dasar-dasar sosiologi Hukum*, h, 185.

sekali tidak terfikir dan tidak ada niatan untuk mendaftarkan usaha nya agar dilakukan audit. Hal itu semakin diperkuat dengan motivasi pemilik hotel mengenai pembangunan usahanya tersebut yang hanya ingin menciptakan stigma baik di mata masyarakat tentang usahanya. Hal ini memicu ketidakselarasan dalam hak dan kewajiban. Dalam hal ini perlu perubahan pemikiran dari sisi pemilik hotel, agar dapat berniatan untuk mendaftarkan diri sebagai hotel syariah yang bersertifikasi. Selain sebagai upaya melegalkan diri di mata hukum namun juga di mata masyarakat luas.

Kedua, semakin diperkuat lagi mengenai tidak adanya sosialisasi sehingga minimnya pengetahuan dan pemahaman pemilik hotel terhadap aturan-aturan yang kemungkinan apabila dilaksanakan sosialisasi akan mempengaruhi ketaatan pemilik hotel terhadap aturan. Perlunya sosialisasi ini diharapkan agar menguntungkan pihak-pihak terkait, bukan hanya pada sisi pembuat peraturan namun juga pada sasaran peraturan.

Sebenarnya penyebab bisa saja diatasi, apabila beberapa pihak bersama-sama memperbaiki penyebab ini. Seperti perlu nya sikap pro aktif kedua pihak, pihak pemilik hotel perlu pro aktif dalam mencari informasi mengenai peraturan tentang usaha hotel syariah dan pihak Dinas Kebudayaan dan pariwisata perlu proaktif dalam mencari pengusaha yang terindikasi berlabel syariah di sebuah usaha jasa pelayanan tersebut.

Beberapa penyebab terkait penyelenggaraan usaha hotel syariah tidak bersertifikat ini muncul dari pihak satu ke pihak lain, artinya ada hal-hal yang memang harus diperjelas terlebih dahulu, diperjelas dalam hal sosialisasi terutama

pada peraturan menteri dan ekonomi kreatif No. 2 Tahun 2014 itu sendiri. Sehingga sasaran peraturan mengetahui dan memahami secara jelas apa saja yang harus dilakukan dan dilaksanakan sesuai perintah yang tertulis dalam Permen Parekraf No. 2 Tahun 2014 tersebut.

Sosialisasi akan bermanfaat untuk para pemilik hotel konvensional yang memiliki keinginan untuk berpindah status dari konvensional menjadi syariah. Sebelum para calon pemilik hotel syariah ini benar-benar mengubah sistem konvensional ke syariah maka terlebih dahulu mengetahui yang menjadi kewajibannya sebagai pemilik untuk pemenuhan audit dalam sertifikasi, ini berlaku pula bagi pengusaha yang hendak mendirikan hotel dengan sistem syariah, agar tidak mendalilkan diri sebagai syariah saja namun juga bisa dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh DSN-MUI melalui audit untuk menilai produk, pelayanan dan pengelolaan.

b. Pemilik hotel tidak mendaftarkan diri sebagai usaha pariwisata

Ada sekitar 69 usaha jasa pelayanan dengan berbagai jenis telah terdaftar di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pencatatan dilakukan berdasarkan pendaftaran yang dilakukan oleh masing-masing pemilik hotel dan dilakukan pemeriksaan berkas oleh pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Lalu setelah dilakukan triangulasi data wawancara dan website ditemukan penambahan jumlah hotel sehingga menjadi 76 hotel dari jenis melati hingga bintang 4 yang tercatat dan di informasikan melalui website Dinas kebudayaan dan pariwisata kota Palangka Raya. Namun, ditemukan bahwa hotel yang

bernama Obelix Hotel Syariah tidak tercatat dan terdaftar pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Hal ini dapat dipicu karena kelengkapan izin yang belum terpenuhi. Pada dasarnya pengusaha pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata wajib melakukan pendaftaran usaha pariwisata untuk memperoleh Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Pengusaha pariwisata dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, badan usaha berbadan hukum.

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup; permohonan pendaftaran, pemeriksaan berkas permohonan, dan penerbitan TDUP. Dokumen persyaratannya tergantung pada bentuk usahanya, jika ia perseorangan ia cukup mempersiapkan Fotocopy KTP, Fotocopy NPWP (nomor pokok wajib pajak) dan perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika usaha berbentuk badan usaha dan badan usaha berbadan hukum maka ia mempersiapkan akta perndirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan), Fotocopy NPWP dan perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain dokumen yang telah disebutkan di atas, khusus untuk usaha penyediaan akomodasi, dilengkapi dengan keterangan tertulis dari pengusaha pariwisata tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar serta tentang fasilitas yang tersedia.

Pendaftaran usaha pariwisata sangatlah penting, sebab bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi pengusaha pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata, menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang

berkepentingan mengenai pendaftaran usaha pariwisata dan juga untuk persyaratan dalam melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata.

Hal ini berlaku pula untuk pendaftaran sertifikasi syariah sebuah hotel, kelengkapan izin termasuk izin usaha pariwisata sangat diperlukan sebagai syarat pengajuan pendaftaran proses sertifikasi.

Ada beberapa hal yang perlu disiapkan dalam pengajuan proses sertifikasi oleh pemilik hotel terkait kelengkapan administratif pendaftaran sertifikasi, dan beberapa hal tersebut sudah disediakan oleh DSN-MUI berupa panduan daftar Periksa untuk mempermudah pemilik hotel dalam menyiapkan segala kelengkapan berkas yang diperlukan, contoh daftar Periksa tersebut meliputi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Untuk persyaratan umumnya sendiri terdiri dari :

- 1) Surat permohonan sertifikasi syariah
- 2) Mengisi ceklis persyaratan sertifikasi syariah
- 3) Pernyataan komitmen dari perusahaan untuk melakukan usaha sesuai syariah
- 4) Membayar biaya sertifikasi syariah
- 5) Melampirkan fotokopi dokumen hukum (legal document)

perusahaan : Akta pendirian perusahaan telah disahkan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia beserta perubahannya (kalau sudah pernah di ubah), Surat izin usaha perdagangan (SIUP), Tanda daftar perusahaan (TDP), Surat izin lain dari otoritas terkait, Surat keterangan domisili perusahaan, NPWP Perusahaan,

Surat keputusan RUPS/Hasil Notulansi Rapat Dewan Komisaris dan Direksi atau keputusan otoritatif di LKS, LBS dan LPS tentang rencana menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sesuai peraturan perundang-undangan

- 6) Melampirkan profil lembaga (LKS, LBS dan LPS) yang berisi uraian tentang : Sejarah lembaga, Dasar hukum lembaga, Visi, misi, tujuan lembaga, Struktur organisasi (sebelum membuka syariah), Profil manajemen, Struktur permodalan, Laporan keuangan, Profil rencana bisnis syariah, Visi, misi, dan tujuan, Rencana struktur organisasi (di dalamnya ada organ DPS), Tahapan persiapan pembukaan keuangan/bisnis syariah, Model bisnis syariah yang akan dijalankan (didalamnya skema akad-akad yang digunakan dan draf dokumen perjanjian), Sistem dan target pemasaran, Mitra kerjasama (Lembaga keuangan/bisnis syariah), Rencana strategi pengembangan bisnis syariah, Profil manajemen syariah, Profil/CV calon DPS (jika ada), Memiliki rekening di lembaga keuangan syariah.

Untuk persyaratan khusus hanya terdiri dari : Fotokopi sertifikat keanggotaan asosiasi bidang usaha, Melampirkan sertifikat halal dari LPPOM-MUI.

Daftar periksa ditentukan secara mutlak oleh Majelis Ulama Indonesia, hal ini diharapkan agar dipenuhi dalam pengajuan proses sertifikasi oleh pemilik hotel.

Jika dilihat secara seksama, daftar periksa dibuat sangat terperinci dan sangat sistematis. Hal ini agar dalam prosesnya, pemenuhan persyaratan dapat memperkuat dari berbagai sisi.

c. Pembinaan dan pengawasan

Selama wawancara berlangsung, peneliti mengarahkan pertanyaan kepada pendaftaran usaha hotel syariah, namun karena Ibu Rina mengatakan selama ini belum ada hotel yang terindikasi syariah dan belum ada hotel yang mendaftarkan diri sebagai usaha hotel syariah jadi Ibu Rina hanya bisa fokus terhadap hotel-hotel yang telah terdaftar di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan itupun hotel konvensional pada umumnya.

Disebabkan oleh itulah usaha hotel syariah yang tidak bersertifikat ini tidak memperoleh pembinaan dan pengawasan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Palangka Raya dan DSN-MUI. Pembinaan dan pengawasan yang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Palangka Raya lakukan hanya kepada Hotel-hotel yang telah tercatat pada Dinas kebudayaan dan pariwisata kota Palangka Raya saja, selain itu pihak Dinas tidak bertanggungjawab atas pembinaan dan pengawasan.

Ini juga menjadi penyebab usaha hotel syariah yang terdapat di kota Palangka Raya tidak melakukan proses sertifikasi. Karena belum adanya sosialisasi, sehingga pihak pemilik hotel tidak mengetahui adanya sertifikat dan menyebabkan hak pembinaan dan pengawasan tidak terlaksana.

Menurut peneliti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Palangka Raya perlu melakukan pendataan secara aktif dalam meningkatkan PAD (Pendapatan

asli daerah) karena dampak dari PAD sendiri sangat luar biasa untuk kepentingan umum, hal ini berkaitan dengan maslahat atau kemaslahatan umat. Jika saja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata lebih aktif dalam pendataan, maka hotel yang selama ini belum terdaftar dan tercatat pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Palangka Raya akan segera terdaftar dan dapat memberikan dampak penambahan PAD untuk perkembangan ekonomi daerah. Dalam urusan syariah, dampak itu dapat memberikan kemaslahatan bagi kepentingan umum.

2. Analisis Akibat Hukum Usaha Hotel Syariah yang Tidak Bersertifikat.

Sebab akibat dalam hukum selalu memiliki keterkaitan baik dalam teori maupun aplikasi. Akibat hukum merupakan suatu bentuk proses dalam berjalannya suatu hukum.

Sertifikasi merupakan suatu bentuk usaha pemilik hotel dalam menunjukkan diri dan menyatakan diri bahwa hotel yang ia kelola secara syariah telah melalui audit kehalalan yang akan memberikan sisi manfaat yang lebih banyak dari mudharatnya. Maka ada kejelasan antara kedua pihak, yakni dari sisi produk, pelayanan dan pengelolaan hotel dan konsumen/tamu hotel.

Pada sisi maslahat, masalah memiliki beberapa tingkatan sesuai kepentingan masing-masing dan menurut peneliti masalah sertifikat usaha hotel syariah ini masuk pada tingkatan tahsiniyah karena masuk dalam isu masalah muamalat dalam bentuk menjauhkan sebuah bisnis dari sesuatu yang haram dan mendekatkan usaha dari sesuatu yang halal. Agar sebuah usaha mencapai nilai

ukhrawi dan selalu pada aturan yang telah Allah perintahkan.⁷² Tahsiniyah merupakan bentuk pelengkap tersier yang mana semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, begitu seterusnya. Dengan istilah lain adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan dan kelapangan. Begitu juga pada sertifikat usaha hotel syariah, sertifikat merupakan sebuah bentuk kemudahan yang ditunjukkan agar kenyamanan dan keamanan dapat dirasakan oleh konsumen hotel.

Berdasarkan kaidah :

الأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ أَلَّا يَبَا حَةً

“Prinsip dasar dalam masalah manfaat adalah boleh”⁷³

Dengan menggunakan kaidah ini, posisi sertifikasi menjadi sangat penting. Sebab sertifikasi merupakan bagian dari manfaat. Manfaat bagi pemilik hotel maupun para tamu yang akan berkunjung.

Kemaslahatan lainnya, apabila hotel telah terdaftar dan pemilik membayar pajak/retribusi sesuai pada peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2010 yang kemudian ada perubahan kedua pada beberapa pasal di peraturan daerah Nomor 21 Tahun 2014 tentang pajak hotel bahwa sebuah penyedia jasa pelayanan berhak membayar sesuai ketentuan yang berlaku, hal ini maka akan menambah pendapatan daerah. Sebagaimana yang kita ketahui, anggaran daerah merupakan kepentingan

⁷²*Opcit*, Suwarjin, MA, Ushul Fiqh, h, 143

⁷³*Opcit*, Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, h, 73

yang dapat digunakan masyarakat luas dan dapat mendatangkan manfaat bagi semua.

Pada sisi kepastian hukum, Menurut Utrecht, kepastian hukum ialah adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.⁷⁴ Jadi ketika usaha hotel syariah memiliki sertifikat halal yang diberikan oleh MUI maka setiap tamu tidak akan bertanya-tanya dan menebak-nebak apakah hotel syariah yang tamu kunjungi tersebut merupakan hotel syariah yang benar-benar sudah sesuai syariat atau belum. Di sinilah letak kepastian hukum bagi para tamu, usaha hotel syariah yang telah bersertifikat akan memberikan kepastian hukum bagi para tamu.

Dalam sebuah wawancara, menurut pelaksana di bidang pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Palangka Raya menyatakan tidak ada akibat hukum dari sisi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan alasan memang hotel yang terkait tidak mendaftarkan diri, hal ini diperkuat dengan pernyataan pemilik hotel bahwa selama beliau mendalilkan diri sebagai usaha hotel syariah memang belum pernah ada teguran. Peneliti memandang, kemungkinan akibat hukum akan didapatkan dalam proses berjalannya usaha, yang mana asas kepastian hukum dari sisi konsumen tidak ada. Hal ini dikarenakan konsumen atau yang biasa disebut tamu hotel tidak mendapat bukti secara eksplisit jika hotel itu memang diakui sebagai hotel syariah. Kemungkinan terburuk juga bahwa akibat hukum akan mengarah kepada kepercayaan masyarakat/calon tamu hotel ini dalam menggunakan fasilitas tersebut karena ketika usaha hotel syariah tidak

⁷⁴*Opcit*, Riduan Syahrani, h, 23

bersertifikat maka kekuatan hukum dalam hal ini akan menjadi lemah, karena sertifikat bisa digunakan untuk sebuah kepastian hukum bagi masyarakat/calon tamu yang hendak menggunakan fasilitas hotel yang mendalilkan diri sebagai syariah. Kepastian hukum yang dimaksud ialah adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Jadi para tamu tidak akan seratus persen meletakkan kepercayaan terhadap hotel apabila tidak ada kepastian hukum, selebihnya dalam hal kenyamanan itu tergantung pribadi masing-masing tamu hotel.

Lain halnya ketika hotel itu sudah memiliki sertifikat, tamu hotel akan mendapatkan kepastian hukum dibuktikan edaran sertifikat audit yang diberikan dan dikeluarkan langsung oleh DSN-MUI. Jadi akibat hukum nya terletak pada sisi kepercayaan tamu hotel secara langsung.

Secara tegas pula dari pihak MUI yang di wakikan oleh sekretaris MUI Bapak Amanto surya langka dalam wawancara menyatakan tidak bisa sebuah hotel mendalilkan diri sebagai syariah ketika tidak mendaftarkan diri dan tidak dilakukan audit untuk menilai kesyariahan dari DSN-MUI yang ditunjuk. Peneliti setuju dengan hal ini, karena itu sudah mutlak seperti yang tertulis di Permen Parekraf No. 2 Tahun 2014.

Dari sisi Permen Parekraf No. 2 Tahun 2014 memandang bahwa akibat hukum pada hotel yang tidak mendaftarkan diri sebagai hotel syariah dan otomatis tidak ada sertifikat yang mana di dalamnya harus ada pemenuhan kriteria mutlak terhadap produk, pelayanan dan pengelolaan yang harus dipenuhi maka tidak boleh mendalilkan diri sebagai syariah. Seperti halnya dalam pasal 8 ayat (3)

menyatakan bahwa usaha hotel yang tidak memenuhi kriteria mutlak dan tidak mutlak seperti halnya dijelaskan pada pasal 7 ayat (3) dan (4) mengenai aspek yang harus dipenuhi maka belum dapat digolongkan dan tidak dapat mendalilkan diri sebagai usaha hotel syariah. Jelas bahwa pemenuhan kriteria mutlak dan tidak mutlak harus dipenuhi dengan proses sertifikasi yang sehingga itu dapat dikeluarkan sebuah sertifikat dari DSN-MUI, jika tidak, maka hotel tersebut tidak bisa mendalilkan diri sebagai usaha hotel syariah.

Namun jika ditelaah lebih dalam, peraturan tersebut hanyalah sebuah larangan. Tidak ada indikasi sanksi bagi pemilik hotel yang mendalilkan diri sebagai syariah yang tidak melakukan sertifikasi kehalalan DSN-MUI. Peraturan yang sebenarnya adalah yang bisa memaksa suatu subjek hukum untuk menaati aturan tersebut, jika tidak ada sanksi kemungkinan besar tidak akan memberikan pengaruh apapun terhadap pelanggar hukum.

Substansi Permen Parekraf No 2 Tahun 2014 haruslah jelas, termasuk dalam bentuk pemberian sanksi terhadap usaha hotel syariah yang mendalilkan diri sebagai syariah namun tidak menyesuaikan diri sebagaimana yang tertulis pada isi permen parekraf No. 2 Tahun 2014 dan tidak melakukan proses sertifikasi.

Jika Permen Parekraf No. 2 Tahun 2014 bersifat Fakultatif seperti ini, memicu harus adanya dukungan pemerintah melalui Perda yang mengatur khusus mengenai penyelenggaraan usaha hotel syariah. Sebab Perda dapat bersifat kepada menindak seseorang yang melakukan pelanggaran.

Ada banyak manfaat ketika sebuah hotel yang mendalilkan diri sebagai syariah dengan segera mendaftarkan diri sebagai syariah, selain semakin memperkuat kepercayaan tamu hotel terhadap hotel yang mendalilkan diri sebagai syariah itu juga sebagai bentuk ketaatan hukum pemilik hotel terhadap Permen Parekraf No. 2 Tahun 2014. Mendaftarkan diri sebagai usaha hotel syariah berguna untuk proses sertifikasi sebagai acuan dalam penerbitan sertifikat halal bagi usaha hotel syariah, hal ini dilakukan dengan melalui beberapa audit untuk menilai terhadap produk, pelayanan dan pengelolaan. Penerbitan dilakukan oleh DSN-MUI yang terkait dengan penyeleksian usaha hotel syariah. Proses sertifikasi akan segera ditindaklanjuti apabila pengusaha mendaftarkan diri sebagai usaha hotel syariah yang tersertifikasi.

Setelah adanya penerbitan sertifikat, usaha hotel syariah akan memiliki hak mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari kementerian pariwisata dan DSN-MUI terkait. Kementerian dan DSN-MUI memiliki kewajiban dalam pembinaan dan pengawasan rutin terhadap usaha hotel syariah tersebut seperti dalam penjelasan pasal 12 ayat (1) menyatakan kementerian dan Majelis Ulama Indonesia secara bersama-sama melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha hotel syariah. Itu artinya dalam keduanya memiliki hak dan kewajiban yang harus terpenuhi.

Namun apabila usaha hotel syariah tidak mendaftarkan diri dan tidak bersertifikat maka itu menjadi kendala dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara keduanya. Hak dan kewajiban sangat berpengaruh dalam kelangsungan sebuah usaha hotel tersebut, sebab kewajiban dalam pemenuhan persyaratan

sertifikasi akan memberikan hak pembinaan dan pengawasan yang akan menambah kualitas dari usaha hotel tersebut.

Kaitannya pula dengan bentuk pembiayaan dari lembaga keuangan syariah, jika sebuah hotel berbasis syariah dan dibuktikan dengan sertifikat maka akan mempermudah proses peminjaman modal apabila memerlukan. Karena dalam lembaga keuangan syariah seperti bank syariah akan memprioritaskan para pengusaha yang memiliki usaha berbasis syariah.

3. Analisis Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan DSN-MUI dalam Pembinaan dan Pengawasan Hotel Terhadap Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

Dalam ranah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Palangka Raya berdasarkan wawancara dengan pelaksana bidang pariwisata menyatakan bahwa belum ada aturan yang mengatur khusus tentang penyelenggaraan usaha hotel syariah ini.

Menurut peneliti efektivitas hukum terlihat seperti tidak berjalan dengan baik, hal ini perlu ditindak lanjuti dalam hal pengetahuan dan pemahaman tugas, seharusnya sesuatu yang merujuk pada kepentingannya menjadi hal yang harus diketahui dan dipahami dengan betul mengenai peraturan yang telah disahkan beberapa tahun yang silam.

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada Substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum. Pertama mengenai substansi, hal ini menyangkut tentang

perangkat perundang-undangan, ini berkaitan dengan produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem yakni orang yang mengeluarkan aturan atau aturan baru yang mereka keluarkan, substansial mempengaruhi apakah hukum dapat dilaksanakan atau tidak. Kedua mengenai struktur hukum/pranata hukum, ini menyangkut tentang aparat penegak hukum, hukum tidak dapat berjalan dengan tegak apabila tidak ada aparat hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Kalau peraturan sudah baik tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah, demikian juga apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka. Ketiga mengenai budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap hukum, bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat.⁷⁵

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus bersinergi dalam menciptakan sadar hukum bagi masyarakat, hal ini ditandai dengan peran yang harus dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terhadap pemilik hotel. Dengan mensosialisasikan Permen Parekraf No. 2 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah ini.

Permen Parekraf No. 2 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah ini merupakan hal penting yang harus diketahui bersama para pemegang tanggungjawab dan tugas dalam bidang pariwisata jasa layanan perhotelan. Sangat perlu diketahui dan pahami bagi pelaksana bidang pariwisata

⁷⁵Bambang Semedi, *Artikel Penegakan hukum yang menjamin kepastian hukum*, W.I Pusdiklat Bea dan Cukai Edisi Desember 2013 (Diakses 04 agustus 2017 pukul 22.28)

ini, agar menjadi acuan atau pedoman bagi calon penyelenggara usaha hotel syariah. Karena dalam Permen Parekraf No. 2 Tahun 2014 pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa :

Kementerian dan Majelis Ulama Indonesia secara bersama-sama melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha hotel syariah.⁷⁶

Perlunya pembinaan dan pengawasan secara bersama yang menjadi tanggungjawab bersama bagi Kementerian dan Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini.

Dalam wawancara pelaksana bidang pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Palangka Raya ini juga mengatakan bahwa Peraturan Daerah belum ada yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha hotel syariah maka dirasa sangat perlu adanya Peraturan Daerah ini, selain sebagai penguat Permen Parekraf No. 2 Tahun 2014 juga Peraturan Daerah merupakan aturan yang secara langsung dikeluarkan oleh walikota setempat sehingga secara langsung pula dapat mengikat para pengguna peraturan di kota tersebut.

Mengenai peran MUI sendiri, dalam pengertiannya, MUI merupakan sebuah wadah para ulama dan cendekiawan yang mengarahkan dan membina masyarakat muslim, termasuk dalam hal penyelenggaraan usaha hotel syariah ini. Pembinaan dan pengawasan, MUI memiliki sebuah dewan yang dibentuk untuk pengawasan bisnis yang berbasis syariah, selain lembaga keuangan syariah juga

⁷⁶*Opcit*, Permen Parekraf No. 2 Tahun 2014 Pasal 12 ayat (1).

penyelenggaraan usaha hotel syariah ini. Pembinaan dan pengawasan dilakukan ketika sebuah hotel mendaftarkan diri sebagai hotel syariah guna mendapatkan sertifikasi kehalalan sebuah bisnis jasa pelayanan. Perlunya pemilik hotel mendaftarkan usahanya guna mendapat hak dalam dibina dan diawasi, jika tidak begitu maka tugas ini tidak akan pernah dilakukan.

Koordinasi antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Palangka Raya dan MUI sangat dibutuhkan dalam hal ini, hanya saja MUI sifatnya pasif karena MUI tidak bisa mengintervensi langsung ke dinas terkait. Itu artinya, MUI harus mendapatkan perintah koordinasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bukan sebaliknya. Jika berbicara mengenai penyelenggaraan usaha hotel syariah koordinasi dirasa sangat perlu dilakukan agar segala sesuatu yang berkaitan dengan sertifikasi kehalalan sebuah hotel dapat berjalan dalam satu pemikiran yang sama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan MUI.

Berdasarkan analisis terhadap pemilik hotel, bahwa perlu kesadaran hukum pemilik hotel untuk mendaftarkan diri sebagai hotel syariah yang bersertifikat agar pembinaan dan pengawasan bisa dilaksanakan oleh dinas terkait dan MUI terkait, agar Permen Parekras No. 2 Tahun 2014 juga dapat dijalankan sesuai dengan yang tertulis di dalamnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka penulis pada bab ini akan memaparkan kesimpulan dari pendalilan usaha hotel syariah tanpa sertifikasi. Maka dengan analisa di atas penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam kenyataannya ditemukan beberapa penyebab usaha hotel syariah di kota Palangka Raya tidak melakukan proses sertifikasi. Pertama, belum dilakukannya sosialisasi Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah kepada masyarakat terutama terhadap pemilik hotel yang menerapkan sistem syariah. Kedua, pemilik hotel tidak mendaftarkan diri sebagai usaha pariwisata. Ketiga, pembinaan dan pengawasan hanya dilakukan terhadap usaha hotel syariah yang telah mendaftarkan diri, selebihnya tidak ada pembinaan dan pengawasan.
2. Dalam proses berjalannya usaha hotel syariah yang tidak melakukan proses sertifikasi, ada akibat hukum yang diterima oleh pemilik hotel. Pertama, tidak ada kepastian hukum. Kedua, pemilik hotel tidak boleh mendalilkan diri sebagai syariah jika belum mendaftarkan diri dan melakukan proses sertifikasi usaha hotel syariah, karena standarisasi kehalalan usaha dilakukan ketika proses sertifikasi.
3. Substansi Permenparekraf No. 2 Tahun 2014 bersifat Fakultatif.

4. Bahwa peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan MUI, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata belum pernah melakukan koordinasi dengan MUI kota yang membahas pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah sekaligus mengenai sertifikasi usaha hotel syariah.

B. Saran

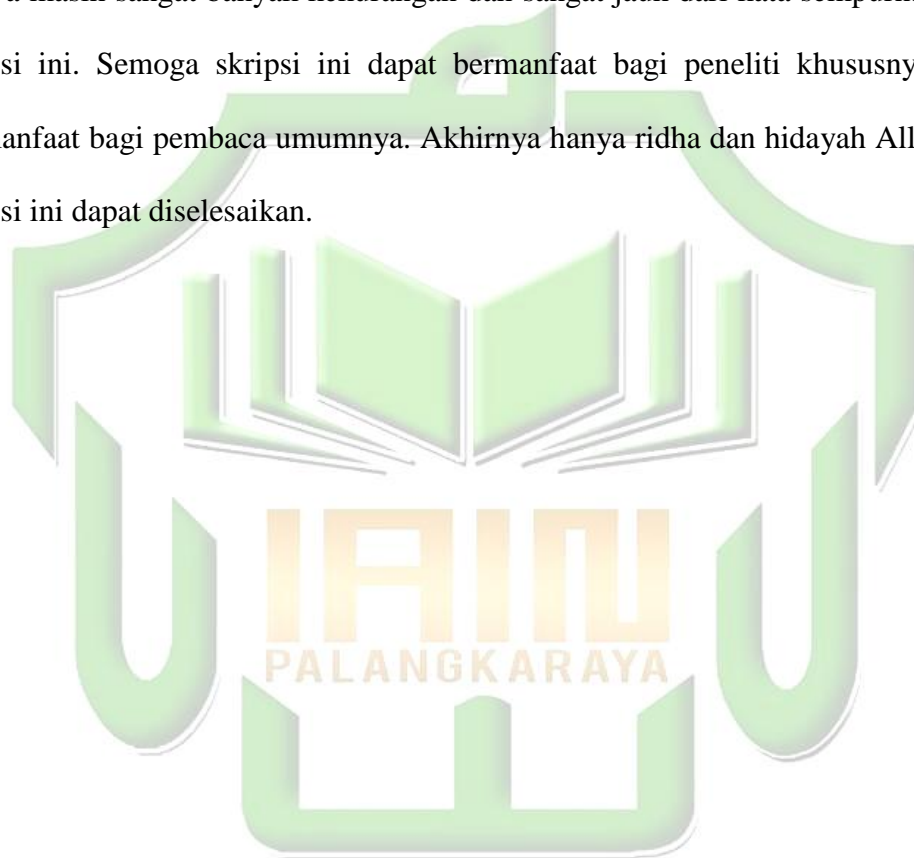
Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran-saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun yang peneliti sarankan dari hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata agar melakukan sosialisasi mengenai peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif No. 2 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah kepada masyarakat terlebih kepada para pemilik hotel dan melakukan pendataan terhadap hotel-hotel yang telah berdiri namun belum mendaftarkan diri.
2. Pemilik Obelix Hotel Syariah agar mendaftarkan diri sebagai usaha pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan segera mendaftarkan proses sertifikasi usaha hotel syariah yang dikelola agar memiliki sertifikat halal.
3. Perlu dibuat perda mengenai usaha hotel syariah agar dapat mengatur lebih detail dan bersifat imperaktif bagi pemilik hotel, Dinas kebudayaan dan pariwisata dan DSN-Mui kota Palangka Raya.
4. Perlu dilakukannya koordinasi antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan MUI yang membahas tentang tugas dan tanggungjawab yang

berkaitan dengan penyelenggaraan usaha hotel syariah di kota Palangka Raya.

C. Penutup

Alhamdulillah hirabbil alamin, segala puji syukur kehadiran Allah SWT pada akhirnya peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan dan sangat jauh dari kata sempurna pada skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bermanfaat bagi pembaca umumnya. Akhirnya hanya ridha dan hidayah Allah lah skripsi ini dapat diselesaikan.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Al-Quran Terjemahan, 2009, Surah Al-Baqarah, Bandung : PT. Madina Raihan makmur.

BUKU

Afifudin dan Veni Ahmad Soebani, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, Cet 2.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Arfan, Abbas, 2013, 99 kaidah fiqh muamalah kulliyah, Malang : UIN-Maliki Pres, Cet II.

Bungin, Burhan, 2010, *Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial*, Jakarta: Kencana.

Dahlan, Abd. Rahman, 2011, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Amzah, Cet 2.

Erwin Muhammad dan Firman Freaddy Busroh, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama, cet. ke-1.

Hamid, Arfin, 2008, *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia (Perspektif Sosio Yuridis)*, Jakarta : Paramuda Bookstore.

J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Pt Asdi Mahasatya, Cet 1.

Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara____.

Kansil, Cst, dan Christine S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Balai Pustaka, 2002. Cet 12.

K, Tri Rama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya : Karya Agung____.

Koto, Alaidin, 2004, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Magany, Richard D, 2009, *Modul Menyediakan Layanan akomodasi reception*, Jakarta : Erlangga.

Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, Cet 9.

Matthew B, 1992, Milles dkk, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI-Press.

Mila, 2011, *Pembelajaran Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta : Kanwa Publisher.

Moleong, Lexy J., 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet 18.

Muhammad Dan Rahmad Kurniawan, 2014, *Visi Dan Aksi Ekonomi Islam*, Malang: Intermedia.

Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2013, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta : Amzah, Cet 3.

Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia____.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana.

Riduwan, 2011, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: ALFABETA, cet 8.

Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta : PT RajaGrafindo, 2013.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, Cet 3.

Sugiyono, 2009, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta.

Sugondo, Deni, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa.

Suwarjin, MA., 2012, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta, Teras.

Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Palangka Raya : STAIN, 2013.

Triwulan, Titik tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2006.

Utami, I Gusti Bagus Rai, 2012, *Metodologi Penelitian Pariwisata dan Perhotelan*, Penerbit Andi, cet 1.

Utsman, 2010, Sabian, *Dasar-dasar sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Utsman, Sabian, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet 1.

PERATURAN MENTERI

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 2

Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 (Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah).

PERATURAN DAERAH

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya, Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Pendaftaran Usaha Bidang Pariwisata pasal 3.

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pajak Hotel.

SKRIPSI

Abdul Warits, Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Minat Konsumen Hotel Syari'ah (Studi Kasus Pada Hotel Graha Agung Semarang), 2009, Penelitian Lapangan.

Enny Rohmawati, Penerapan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif No. 9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Pariwisata Pada Syariah Guest House Perspektif Masalah, 2016, Penelitian Lapangan.

Syarifuddin, Analisis Produk, Pelayanan Dan Pengelolaan Bisnis Perhotelan Syariah Pada Hotel Syariah Walisongo Surabaya, 2016, Penelitian Lapangan.

WEBSITE

Anonim, *Pendekatan studi kasus dalam penelitian kualitatif*,
www.menulisproposals.com diakses pada tanggal 19-3-2017 pukul 07.10 WIB.

Anonim, <http://alwi-ushulfiqih.blogspot.co.id/2010/04/maslahat.html> diakses pada tanggal 19 Maret 2017 pukul 6.47 WIB.

Alamsyah, <https://disbudpar.palangkaya.go.id/perda-ripparda-dan-perda-penyelenggaraan-kepariwisataan-diselenggaraan/> (diakses 05 september 2017 pukul 10.48)

Badan Pusat Statistik kota Palangka Raya, <http://kalteng.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/90> (Diakses 13 maret 2017 pukul 09.22).

Badan Pusat Statistik Kalteng, Berita Resmi Statistik Provinsi Kalimantan Tengah No. 10/06/62 Th. XI, 2 Juni 2017 (Diakses 8 Juni 2017 Pukul 07.00)

Review Tamu, <https://m.traveloka.com/hotel/indonesia/obelix-hotel-syariah-3000010003753> (Diakses 3 november 2016 pukul 22:34.

Ruswandi, *Hotel Dengan Kaidah Syariah*, Makalah, <http://mentoringku.wordpress.com/2008/10/27/hotel-dengan-kaidah-syariah/> (Diakses 13 November 2016 Pukul 17.18).

Semedi, Bambang, *Artikel Penegakan hukum yang menjamin kepastian hukum*, W.I Pusdiklat Bea dan Cukai Edisi Desember 2013 (Diakses 04 agustus 2017 pukul 22.28).

DOKUMEN

Tata tertib Obelix Hotel Syariah.